



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGUNAAN HAK FASAKH OLEH ISTRI
NARAPIDANA 2 TAHUN DI LAPAS KELAS
II B PASIR PENGARAIAN MENURUT
HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

SITI FATIMAH LUBIS
NIM : 21790225833

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H/2020 M**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O. BOX. 1004
 Phone & Fax : (0761) 858832, Website : <http://uin-suska.ac.id> E-mail : pps_uinsuskariau@gmail.com

Lembar Pengesahan

Nama : Siti Fatimah Lubis
 Nomor Induk Mahasiswa : 21790225833
 Gelar Akademik : M.H.(Magister Hukum)
 Judul : Penggunaan Hak Fasakh Oleh Istri Narapidana 2
 Tahun di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Menurut
 Hukum Islam

Dr. Andi Murniati, M.Pd
 Penguji I/ Ketua

Digitally signed
 by Dr. Andi
 Murniati, M.Pd.
 Date: 2020.05.14
 17:30:07 +07'00'

Dr. Idris, M.Ed
 Penguji II/ Sekretaris

Dr. Junaidi lubis, M.Ag
 Penguji III

Dr. Helmi Basri, Lc, MA
 Penguji IV

Tanggal Ujian / Pengesahan : 14 April 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“PENGUNAAN HAK FSAKH OLEH ISTRI NARAPIDANA 2 TAHUN DI LAPAS KELAS IIB PASIR PENGARAIAAN MENURUT HUKUM ISLAM)”**, yang di tulis oleh saudari :

Nama : Siti Fatimah Lubis
NIM : 21790225833
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah di ujikan pada tanggal 17 April 2020

Penguji I

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.
NIP. 19670822 199803 1001


.....
Tgl: 8 Mei 2020

Penguji II

Dr. Helmi Basri, Lc, MA
NIP. 19740704 200604 1 003


.....
Tgl: 8 Mei 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.
NIP. 19670822 199803 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul **“Penggunaan Hak Fasakh Oleh Istri Narapidana 2 Tahun di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Menurut Hukum Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyah)”** yang di tulis oleh :

Nama : Siti Fatimah Lubis
 Nim : 21790225833
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2020

Pembimbing I,

DR. Jumni Nelli, M. Ag
 NIP. 197206282005012004

Pekanbaru, Januari 2020

Pembimbing II,

DR. Abdul Muza, Shi, M. Ag
 NIP. 197702272003121002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Junaidi Lubis, M. Ag
 NIP. 196708221998031001



© UIN Suska Riau

DR. JUMNI NELLI, M. Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
Siti Fatimah Lubis

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di
Pekanbaru

Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama : Siti Fatimah Lubis
Nim : 21790225833
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Penggunaan Hak Fasakh Oleh Istri Narapidana 2 Tahun di
Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Menurut Hukum Islam
(Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 31 Januari 2020
Pembimbing I,

DR. Jumni Nelli, M. Ag
NIP. 197206282005012004

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

DR. AMRUL MUZAN, Shi, M. Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
Siti Fatimah Lubis

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di Pekanbaru

Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama	: Siti Fatimah Lubis
Nim	: 21790225833
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Penggunaan Hak Fasakh Oleh Istri Narapidana 2 Tahun di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Menurut Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 07 Februari 2020
Pembimbing II

DR. Amrul Muzan, Shi, M. Ag
NIP. 197702272003121002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Fatimah Lubis

Nim : 21790225833

Tempat/Tanggal Lahir : Sei Tapung, 31 Januari 1994

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya yang Berjudul “**Penggunaan Hak Fasakh Oleh Istri Narapidana 2 Tahun di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Menurut Hukum Islam**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam penulisan Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 3 April 2020



SITI FATIMAH LUBIS
NIM. 21790225833



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang masih saja memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga dengan rahmat dan kasih sayang-Nya tersebutlah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Sholawat beriring salam tidak lupa penulis sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia umumnya dan umat islam khususnya dari zaman kegelapan serta kebodohan ilmu pengetahuan menuju kealam yang benar dengan cahaya kebenaran serta banyak mengerti ilmu pengetahuan yang membahagiakan manusia.

Pokok-pokok yang tertuang dalam tesis yang berjudul **“PENGUNAAN HAK FASAKH OLEH ISTRI NARAPIDANA 2 TAHUN di LAPAS KELAS II B PASIR PENGARAIAN MENURUT HUKUM ISLAM ”** ini, disusun dengan bantuan berbagai pihak.

Dengan telah menyelesaikan proposal tesis ini, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusun hingga selesainya proposal ini yaitu kepada:

1. Terima kasih yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada orang tua dan keluarga tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- moril, materil, serta do'a. Ayahanda Munar Ali Lubis, Ibunda Khodijah, kanda (Mukhlis), Adinda Khoirun Ni'mah, dan Khoirul Abdi
2. Bapak Prof. DR. H. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademik UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Prof. DR. H. Afrizal M, MA selaku Direktur Pascasarjana UIN SUSKA Riau.
4. Bapak DR. Junaidi Lubis, MA selaku ketua Prodi Jurusan hukum keluarga, yang telah memberikan bimbingan nasehat terbaik selama perkuliahan.
5. Ibu DR Jumni Nelli, M. Ag selaku pembimbing 1 dan Bapak DR. Amrul Muzan, SHi, M. Ag selaku pembimbing II yang selalu menasehati dan memberi motifasi dalam pembuatan tesis ini.
6. Bapak dan ibuk dosen Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terima kasih atas ilmu yang diajarkan, mudah-mudahan menjadi amal baik dan pahala disisi Allah SWT, Amin.
8. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S2 Jurusan Hukum Keluarga 2018 semoga sehat selalu dan sukses.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Buat yang paling Spesial Agus Priadi, S.T sang pendingin hati pelipurlara yang selalu menemani dalam suka dan duka dari awal hingga sejauh ini.

10. Terimakasih juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Lapas yang telah membantu saya dalam penelitian hingga terselesaikan nya tesis ini.

Mudah-mudahan penulisan tesis ini dapat bermanfaat dalam pengembangan dunia ilmu pengetahuan bagi kita semua, baik bagi kami pribadi, para pembaca dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua kebaikan yang penyusun dapatkan dari mereka menjadi amal kebaikan di sisi Ilahi serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Tidak ada gading yang tak retak dan tidak ada manusia yang sempurna, selaku manusia biasa penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan kemudian hari. Mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 14 Mei 2020

Siti Fatimah Lubis

NIM : 21790225833



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Nota Dinas

Persetujuan Pembimbing & Ketua Prodi

Surat Pernyataan

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
Transliterasi Arab Latin	ix
Abstrak.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Masalah	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Batasan Masalah	7
3. Rumusan Masalah	8
C. Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
3. Jenis dan Metode Penelitian	9
4. Subjek dan Objek Penelitian.....	11
D. Data Penelitian	11
1. Sumber Data	11
2. Metode Pengumpulan Data	12
3. Metode Analisis Data	13
E. Populasi dan Sampel	14
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Penjelasan dan Defenisi Operasional	18
H. Sistematika Penulisan.....	20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II NARAPIDANA LAPAS KELAS II B PASIR PENGARAIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	22
B. Lembaga Pemasyarakatan	
a. Sejarah Lapas.....	22
b. Pola Pembinaan Pemasyarakatan	23
c. Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan	30
d. Tujuan Pembinaan	32
e. Faktor-faktor Penghambat Pembinaan	34

BAB III PUTUSNYA PERKAWINAN

A. Talak.....	45
1. Pengertian Talak	45
2. Syarat-syarat dan Rukun Talak	46
3. Macam-macam Talak	47
B. Khuluk	48
1. Pengertian Khuluk	48
2. Syarat sahnya Khuluk.....	48
C. Fasakh	
1. Pengertian Fasakh.....	49
2. Dasar Hukum Fasakh	51
3. Syarat-syarat Fasakh.....	56
4. Sebab-sebab Terjadinya Fasakh	57
5. Pelaksanaan Fasakh	63
6. Konsekuensi Hukum Fasakh	65
7. Konsekuensi Hukum Setelah Terjadi Fasakh.....	68
8. Perbedaan Talak dan Fasakh	70
9. Taklik Talak.....	75

BAB IV PENGGUNAAN HAK FASAKH OLEH ISTRI NARAPIDANA 2 TAHUN DI LAPAS

A. Alasan Istri Minta Fasakh Kepada Suami.....	77
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Fasakh Istri	93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR SINGKATAN

NO	Singkatan	Kepanjangan dari Kata
1	Swt.,	Subahanahu wa Ta'ala
2	Saw.,	Shallallahu 'Alaihi Wasallam
3	As.,	'Alaihissalam
4	Q.S	Al-Qur'an Surat
5	Hal	Halaman
6	t.pn	Tanpa Penerbit
7	t.tp	Tanpa Tempat Penerbit
8	t.t	Tanpa Tahun Penerbit
9	w.	Wafat
10	H.R	Hadits Riwayat
11	r.a	Radiya Allah 'anhu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
	A		Th
	B		Zh
	T		‘
	Ts		Gh
	J		F
	H		Q
	Kh		K
	D		L
	Dz		M
	R		N
	Z		W
	S		H
	Sy		,
	Sh		Y
	Dl		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	Misalnya	menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang =	Î	Misalnya	قِيلَ	menjadi Qîla
Vokal (u) panjang =	Û	Misalnya	menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, waw udanya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		misalnya	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	أَـ	misalnya	خير	menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah ()

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditran sliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilang kan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masyâ’ Allâh kâna wamâ lam yasya’ lam yakun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penggunaan Hak Fasakh Oleh Istri Narapidana 2 Tahun di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Menurut Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020

ABSTRAK

Oleh:

SITI FATIMAH LUBIS

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan batalnya perkawinan atau putusya perkawinan. Atau yang dimaksud dengan fasakh nikah membatalkan atau memutuskan ikatan hubungan antara suami dan istri. Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum khusus yang mengatur tentang hukuman penjara atau hukuman berat lainnya sebagai alasan hukum perceraian. Namun, “implikasi negatif” dari hukuman penjara dan hukuman berat lainnyalah yang dapat menjadi alasan hukum perceraian, suami menjalani hukuman penjara dan hukuman berat lainnya, dan tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami selain itu, “perilaku yang sangat buruk” sebagai refleksi dari hukuman penjara atau hukuman berat yang dijalani oleh suami dapat menjadi alasan istri mengajukan fasakh terhadap suami.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang yang seluruh jumlah populasi yang di jadikan sampel dengan menggunakan tehnik *total sampling*.

Dari hasil penelitian ini dapat di fahami bahwa penggunaan hak fasakh istri dibolehkan sesuai pasal 116, istri boleh menggunakan perceraian bila suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat. Namun, dalam kenyataannya di lapas istri minta cerai saat suami hanya dipenjara selama 2 tahun. Adapun yang menjadi penyebab istri meminta fasakh terhadap suami yaitu suami nya tersebut masuk penjara dikarenakan memakai narkoba dan menjadi narapidana selama 2 tahun lamanya dan karena nafkah lahir dan batin, terjadi perselisihan antara suami dan istri. Argumentasi hukum bahwa perilaku buruk suami yang terbukti dari hukuman penjara atau hukuman berat lainnya yang dijalani oleh suami karena “melakukan tindak pidana tertentu” sebagai alasan hukum perceraian menurut hukum Islam, kemudian telah dipositivisasi dalam Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

استخدام حقوق الفساح من قبل زوجات السجناء لمدة عامين في السجن فئة ثانية "ب" فاسير فنغاريان في منظور الشريعة الإسلامية ، كلية الدراسات العليا بجامعة السلطان الشريف القاسم الإسلامية رياو، 2020

الباحثة:

سي تي فاطمة لوبس

خلفية هذا البحث هي إلغاء الزواج أو فسخ الزواج. والمقصود بالفسخ هو إلغاء أو فسخ الرابطة بين الزوج والزوجة. لا يوجد في الشريعة الإسلامية أحكام قانونية محددة تحكم عقوبة السجن أو الأحكام القاسية الأخرى كسبب لقانون الطلاق. ومع ذلك، فإن "الآثار السلبية" لعقوبة السجن والعقوبات القاسية الأخرى يمكن أن تكون سببا قانونيا للطلاق ويقضي الزوج عقوبة السجن وعقوبات قاسية أخرى ولم يكن قادرا على القيام بواجباته كزوج. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون "السلوك السيئ للغاية" باعتباره انعكاسا للسجن أو العقوبة القاسية سببا للزوجة في تقديم الفسخ لزوجها.

هذا البحث هو بحث ميداني باستخدام طريقة البحث الوصفي النوعي. عينته 3 أشخاص وتم أخذ المجتمع كله كالعينات بطريقة معاينة كلية.

يمكن أن يفهم من نتيجة هذا البحث أن حق الزوجة في استخدام الفسخ مسموح به وفقا للمادة 116، يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق إذا حكم الزوج بالسجن لمدة 5 سنوات أو أكثر. ومع ذلك، في الواقع، طلبت الزوجة الطلاق عندما تم سجن الزوج لمدة عامين فقط. أما سبب طلب الزوجة الفسخ لزوجها هي تحشيش المدمن من قبل الزوج وسجن لمدة عامين، غير قادر على توفير المعيشة الداخلية والخارجية والنزاع بين الزوج والزوجة. الحجة القانونية القائلة بأن السلوك السيئ للزوج يثبت بالسجن أو بالعقوبات القاسية الأخرى من قبل الزوج "لفعله جنائية معينة" كسبب القانون لطلب الطلاق في منظور الشريعة الإسلامية، ثم تم وضعه في المادة 116 حرف ج تجميع



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الشريعة الإسلامية التي تؤكد أن الطلاق يمكن أن يحدث لحصول أحد الطرفين على حكم بالسجن لمدة 5 سنوات أو عقوبة أشد بعد الزواج.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

**The Right of *Fasakh* Used by the Two- Year Prisoners' Wives in the Prison of Class II B Pasir Pengaraian in Accordance with Islamic Law
Post Graduate Program of Sultan Syarif Kasim State Islamic University of Riau, 2020**

**Written by
SITI FATIMA LUBIS**

This study was conducted due to the cancellation or determination of marriage or what is meant by the marriage *fasakh* canceling or breaking off the relation between a husband and a wife. In Islamic law there is no specific legal provision of law governing imprisonment or other severe sentences as a reason for the law of divorce. However, the negative implications of imprisonment and other severe sentences can be the reasons for it, the husband has a prison sentence and other severe sentences, and can no longer carry out his obligations as a husband and even have very bad behavior as the reflections of the imprisonment sentence or severe punishment served by the husband that can be the reasons for the wife to do *fasakh* to her husband.

This study employed a field research in term of a descriptive qualitative research method. The samples used were 3 people from the entire population or by using total sampling techniques.

From the results of this study, it can be understood that *fasakh* divorce is allowed in accordance with the law in an article number 116, a wife may petition for divorce if the husband receives a prison sentence of 5 years or more. However, in reality the wife asked for a divorce when the husband was only imprisoned for 2 years. The causes of petitioning for *fasakh* divorce to her husband are that her husband was imprisoned for two years because of using drugs, unfulfilled wife's physical and spiritual needs, and a dispute between husband and wife. The legal argument is that the husband's bad behavior is proven by imprisonment or other severe punishment for committing certain criminal acts as a reason for divorce law according to Islamic law, then it has become a rule as stated in the article number 116 letter c of the compilation of Islamic Law which confirms that divorce can occur because one of the parties (husband or wife) receive a five-year sentence in prison or a heavier sentence after the marriage.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam masa modern saat ini, banyak sekali terjadi perceraian yang dilaksanakan baik di Pengadilan Agama maupun di luar Pengadilan Agama. Perceraian dapat terjadi tentunya disebabkan oleh berbagai faktor sehingga hubungan perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan. Perceraian pada umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki yang menceraikan istrinya. Namun, sekarang ini banyak pula istri yang menggugat cerai suaminya. Salah satunya adalah istri menggugat cerai suaminya dikarenakan suaminya masuk penjara atau tersandung kasus pidana sehingga harus menjalani hukuman di jeruji penjara.

Dari berbagai faktor di atas yang akhirnya menimbulkan kesalahpahaman dalam rumah tangga. Ketika timbul keadaan tidak nyaman, terkadang dapat diatasi sehingga antara keduanya menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahpahaman itu menjadi berlarut-larut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antara suami dan istri hingga sampai ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.¹

Dalam konteks pemutusan hubungan perkawinan, ada tiga metode dan istilah yang dipakai dalam fiqih Islam yaitu cerai talak (*talaq*), gugat cerai (*khuluk*), dan *fasakh*. Cerai talak adalah pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami sedangkan gugat cerai adalah permintaan pemutusan

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2012) Cet. II, hal. 98.



hubungan perkawinan yang dilakukan oleh istri. Dalam literature gugat cerai disebut juga dengan *khulu'*²

Suatu gugatan perceraian akan diakui Negara dan akan memiliki kekuatan legal formal apabila dilakukan di Pengadilan Agama dan diputuskan oleh seorang Hakim. Untuk mengajukan gugatan cerai atau *khulu'*, seorang istri atau wakilnya dapat mendatangi Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal mereka. Bagi yang tinggal di Luar Negeri, gugatan diajukan di PA wilayah tempat tinggal suami. Bila istri dan suami sama-sama tinggal di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat keduanya menikah dulu, atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Menurut Hukum Islam dikenal istilah “*Fasakh*” yang artinya merusak atau membatalkan. *Fasakh* dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan perkawinan sudah berlangsung.³

Perkawinan dalam Islam bukanlah sekedar perbuatan perdata semata. Melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera *sakinah* (tentram), *mawaddah* (saling mencintai), *warahmah* (saling mengasihi). Hal ini sejalan dengan definisi perkawinan sebagaimana di tentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 9.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 113.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”⁴

Perceraian dalam hukum Islam suatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW.

Sebagai berikut:

بن عمر رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه)⁵

Artinya: “perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya thalak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, seperti melalui hakam dari kedua belah pihak.⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru

⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet 1, hal. 259.

⁵ Sunan Ibn Majah, *Al-Maktabah Tsamilah* Juz 1, hal. 650.

⁶ Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan perkawinan muslim perkawinan kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hal. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagimaha Mengenal.” (An-Nisaa’: 35)⁷

Al-Qur’an menyerukan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan tanggung jawab dan balasan amal, ada keseimbangan (timbang balik) antara hak dan kewajiban suami dan isteri. Meskipun demikian, ada kesan seruan keseimbangan ini diikuti dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan, misalnya disebutkan bahwa suami memiliki kelebihan satu derajat dibanding isteri, dan suami mempunyai status pemimpin.⁸

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Oleh karena itu, akan menjelaskan perbedaan cerai gugat dan cerai talak yang dimaksud dalam permasalahan KHI satu persatu sebagai berikut:

Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau isteri.⁹

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagai berikut:

⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Lajnah Pentashih Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1989), hal. 123.

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal.



Putusnya Hubungan Perkawinan

a. Pasal 113 KHI, menyatakan putusnya perkawinan karena 3 sebab:

1. Kematian.
2. Perceraian, dan
3. Atas putusan pengadilan.

b. Karena kematian itu adalah Allah, karena perceraian itu terbagi dua, sebagaimana bunyi pasal 114 yang mengatakan: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai”.

c. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 menyatakan: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

d. Pasal 116 c menjelaskan tentang bahwa boleh bercerai karena suaminya masuk penjara, pasal 116 c dijelaskan lagi oleh pasal 135. Pasal 116 sebab-sebab boleh mengajukan perceraian;¹⁰

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karenahal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (tahun) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hal. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹²

e. Pasal 135 yang menyatakan, “suami terkena hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih

Istri boleh mengajukan perceraian bila suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat. Namun dalam kenyataannya di kelas IIB Pasir Pengaraian istri melakukan perceraian sementara suami hanya dipenjara selama 2 tahun.

Dari hasil wawancara lapangan, yang penulis lakukan dengan pihak terlibat menangani kasus hak fasakh tersebut, alasan istri menggugat suaminya yang masuk penjara itu adalah karena istri khawatir dengan kehidupannya dan tidak merasa nyaman sebagai istri yang tanpa suami karena suami tersandung

¹¹ Ahrun Hoerudin, *Pengadilan Agama Bahasan Tentang Pengertian Pengajar Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, tt), hal. 9.

¹² *Ibid.*, hal. 10.



kasus pidana, tidak mendapatkan nafkah, karena suaminya masuk penjara, tidak diberikan nafkah dan terjadi pertengkaran antara suami dan istri¹³

Di sisi lain ketika suaminya menjadi narapidana, maka istri akan terbebani dengan persoalan nafkah dan tanggung jawab yang dilakukan oleh suami selama ia dalam penjara. Maka ada beban dan tugas terbaru bagi sang istri yaitu bagaimana mereka mempertahankan kehidupan rumah tangganya dalam keadaan suami yang sedang menjalani masa hukuman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis perlu melakukan penelitian apa saja perceraian tersebut terjadi padahal, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia atau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penggunaan hak fasakh oleh narapidana yang menjadi tema dalam penelitian ini sebetulnya banyak masalah yang bisa teridentifikasi, seperti pengertian fasakh, dasar hukumnya, dan yang menjadi penyebab fasakh itu sendiri, alasan istri narapidana yang terpidana 2 tahun meminta fasakh kepada suaminya, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hak fasakh yang digunakan oleh istri

2. Batasan Masalah

Permasalahan terkait dengan fasakh ini terdapat beberapa sudut pandang yang bisa kita teliti. Agar tesis ini terarah dan dapat memberikan hasil yang

¹³ Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hal. 10.



maksimal serta sesuai dengan tujuannya, maka penulis membatasi kajian ini. Karena begitu luas pembahasan ini, maka penelitian ini dibatasi pada penggunaan hak fasakh oleh istri narapidana 2 tahun di Lapas kelas 11 b Pasir Pengaraian menurut Hukum Islam.

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja alasan istri narapidana yang terpidana 2 tahun meminta fasakh.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hak fasakh yang digunakan oleh istri?

C. Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan istri narapidana meminta hak fasakh kepada suaminya.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hak fasakh yang digunakan oleh istri narapidana.

2. Manfaat Penelitian

Sebagaimana lazimnya suatu pembahasan mempunyai kegunaan dan manfaat, dalam pembahasan tesis ini manfaatnya antara lain.

a. Manfaat teoritis

Adapun yang menjadi manfaat teoristisnya dimaksudkan untuk dapat memperluas pemahaman serta pengetahuan dan bagi para pembaca umumnya, mahasiswa, masyarakat umum, khususnya peneliti pribadi terhadap terhadap hak fasakh yang digunakan oleh istri narapidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. Manfaat praktis,

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam menambah keilmuan dan keputusan PPS UIN Sultan Syarif Kasim Riau berkaitan dengan penggunaan hak fasakh istri narapidana. Untuk menambah cakrawala pemikiran yang logis, sekaligus sebagai tambahan informasi yang bernilai ilmiah.
- 2) adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar magister dalam bidang hukum Islam (M.H) di Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.¹⁴ Atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.¹⁵

Defenisi lain penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu

¹⁴ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 2.

¹⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 60.

konteks khusus yang alamiyah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁶

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.¹⁷

Penelitian studi kasus akan kurang kedalamannya bilamana hanya dipusatkan pada fase tertentu saja atau salah satu aspek tertentu sebelum memperoleh gambaran umum tentang kasus tersebut. Sebaiknya studi kasus akan kehilangan artinya kalau hanya ditujukan sekedar untuk memperoleh gambaran umum namun tanpa menemukan sesuatu atau beberapa aspek khusus yang perlu dipelajari secara intensif dan mendalam. Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain, data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti.¹⁸

Penelitian ini ingin mengungkap Penggunaan Hak Fasakh Oleh Istri Narapidana 2 Tahun di Lapas kelas II B Pasir Pengaraian Menurut Hukum Islam.

¹⁶ Moleong, *Metodologi...*, hal. 6.

¹⁷ Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2003), hal. 1.

¹⁸ *Ibid*, hal. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah istri narapidana lapas kelas II B Pasir Pengaraian yang dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. Objek dalam penelitian adalah penggunaan hak fasakh oleh istri narapidana di lapas Pasir Pengaraian

D. Data Penelitian

1. Sumber Data

a. Data Primer

data yang diperoleh dari objek yang diteliti.¹⁹ Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari.²⁰ Dalam hal ini, peneliti memperoleh data secara langsung mengamati dan mencatat Fenomena melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi sehingga didapat data berupa rekaman suara/gambar, catatan, dokumen, literature kitab Fiqih Islam Waadillatuhu/Fiqih Munakahat, buku tentang Perceraian. Alasan peneliti menggunakan semua data penelitian diatas sebagai data primer karena data-data tersebut sangat sesuai penelitian ini, merupakan data pokok yang harus ada untuk menyelesaikan penelitian ini, dan sangat tepat untuk menjawab fokus penelitian yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

¹⁹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Granit, 2005), hal. 57.

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.



Adapun sumber data primer adalah hasil wawancara dan observasi tentang Penggunaan Hak Fasakh oleh Istri Narapidana 2 Tahun di Lapas kelas II b Pasir Pengaraian. Adalah Petugas Lapas, Narapidana, Istri Narapidana, yang mengetahui tentang Penggunaan Hak Fasakh oleh Istri Narapidana 2 Tahun di Lapas Kelas II b Pasir Pengaraian tersebut.

b. Data Sekunde

data yang diperoleh di luar dari objek yang diteliti yaitu diperoleh dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan melengkapi buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan wawancara langsung terhadap para pegawai menanyakan dan memperoleh data dengan proses tatap muka secara langsung dengan informan penelitian di Lapas kelas II B Pasir Pengaraian, percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara/peneliti yang mengajukan langsung pertanyaan dan pihak atau salah satu pegawai bagian umum yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti²¹

b. Observasi

²¹ Pegawai Lapaz kelas II B Pasir Pengaraian

Teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan dengan cara mengamati langsung dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²² Metode ini mengamati secara langsung terhadap hal-hal yang mendukung dalam penelitian ini.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari data-data dari buku-buku, teori-teori dan pendapat para ahli yang dapat menjelaskan bagaimana hukum-hukum atau aturan-aturan dalam melakukan sesuatu sebagaimana sesuai dengan aturan agama Islam

d. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan mencari sumber-sumber, dengan menggunakan dokumen-dokumen, buku-buku, serta mengamati dan mempelajari bermacam-macam bentuk dan data dengan cara mengumpulkan dokumentasi yang terdapat di Lapas Pasir Pengaraian.

3. Metode Analisis Data

Untuk melakukan analisis data terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menurut Seiddel proses analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Menurut sesuatu yang dihasilkan dari lapangan, kemudian diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

²² Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Aksara, 2003), hal. 70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengumpulkan, memilih-milih dan mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeks.
- c. Penentuan Karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang Penggunaan Hak Fasakh Oleh Istri Narapidana 2 Tahun di Lapas Rokan Hulu, maka informan kunci yang paling sesuai adalah Narapidana Lapas kelas II b. Informan selanjutnya adalah Istri narapidana yang memiliki, mengalami peristiwa terkait dengan penelitian tentang hak fasakh oleh Istri Narapidana Lapas kelas II B. Rokan Hulu.

E. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif digunakan istilah populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang, yang seluruh jumlah populasi yang dijadikan sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*²³.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu peneliti tidak

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), cet. IX, hal. 85



menemukan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian serta menentukan orisinalitas pokok pembahasan penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu, yang terkait dengan penelitian yang peneliti ajukan.

1. Jurnal yang ditulis Muhammad Arif Wahyudi (2009), yang berjudul *Fasakh Perkawinan Dengan Alasan Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Istri Dalam Perspektif Imam Abu Hanifah*. Dalam Tesis ini di bahas menganalisis istinbat hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dan bagaimana relevansinya dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mentelaah istinbat hukum yang di pakai Abu Hanifah untuk memperkuat pandangannya. Pendapat Imam Abu Hanifah ini di satu sisi dapat dijadikan alternatif untuk menimalisir terjadinya perceraian, namun di sisi lain banyak mudharat yang akan terjadi, di antaranya hak nafkah istri menjadi hilang, suami menjadi kurang bertanggung jawab atas kewajibannya memberi nafkah istri.²⁴
2. Penelitian yang dilakukan oleh Suni, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.²⁵ Dengan judul: *Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam* dalam tesis ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat istri akibat suami masuk penjara dan tinjauan

²⁴ Muhammad Arif Wahyudi, *Fasakh Perkawinan Dengan Alasan Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Istri Dalam Persepektif Imam Abu Hanifah*, Thesis Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

²⁵ Suni, *Cerai Gugat Istri Akibat Suami di Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Thesis, Uin Raden Fatah Palembang, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum positif terhadap cerai gugat istri akibat suami dalam penjara. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa istri nya tersebut meminta perceraian karena suaminya tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin. Sementara keperluan hidup sekarang makin susah dan makin mahal.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nizamuddin, Nim 110908136 UIN Arraniry Darussalam Banda Aceh.²⁶ Dengan judul: *Fasakh* Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istrinya Menurut Pendapat Imam Syafi'i dalam tesis ini membahas mengenai pendapat Imam Syafi'i tentang istri yang mengajukan *fasakh* terhadap suami-nya karena tidak sanggup menafkahnya dan metode *istinbat* Imam Syafi'i tentang istri yang mengajukan *fasakh* terhadap suaminya karena tidak sanggup menafkahnya. Adapun hasil penelitian ini adalah apabila seorang suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya, maka suami dapat menyuruh istrinya untuk memilih (*ber-khiyar*) antara menetap hidup bersama suami atau bercerai. Pendapat Imam Syafi'i ini dapat dimengerti karena setiap pria yang berani menikah dengan seorang wanita itu menunjukkan bahwa pria tersebut sebagai suami berani menanggung semua resiko. Kemudian Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa *qiyas* yaitu mengqiyaskan ketidakanggupan suami memberi nafkah.

²⁶ Nizamuddin, *Fasakh Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istrinya Menurut Pendapat Imam Syafi'i*, Thesis Uin Arraniri Darussalam Banda Aceh, 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rabiatal Adawiyah (2015), UIN Antasari.²⁷ Dengan judul Hak-Hak Suami yang Berstatus Narapidana Terhadap Gugat Cerai dalam jurnal ini membahas mengenai gugatan istri terhadap suami karena suaminya melakukan pelanggaran hukum yang menjadikan suaminya terpidana, dikarenakan nafkah yang tidak terpenuhi oleh suami menjadi penyebab istri menggugat cerai suaminya. Serta adanya pengetatan dalam pemberian hak-hak narapidana serta yang sering terjadi pengingkaran dalam menjamin hak-haknya. Sehingga perkara gugat cerai terhadap suami berstatus narapidana selalu diputus secara verstek (putusan diluar hadir) yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap suami, selain sebagai tergugat suami juga berstatus narapidana yang menjalani masa pidana dengan kehilangan kemerdekaan.

Sementara peneliti penulis tentang Penggunaan Hak Fasakh oleh Istri Narapidana 2 Tahun di Lapas kelas IIB Pasir Pengaraian Menurut Hukum Islam. Seorang istri menggugat cerai suami dikarenakan tidak terpenuhinya nafkah lahir batin selama 2 tahun, terjadi pertengkaran antara suami dan istri, kemudian dikarenakan suami masuk penjara akibat memakai narkoba.

Dari penjelasan di atas, maka peneliti ingin mengambil judul “Penggunaan Hak Fasakh Oleh Istri Narapidana 2 Tahun di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Menurut Hukum Islam”. Untuk memperjelas maksud dari judul penelitian ini dan untuk menghindari terjadinya kesalah fahaman maka peneliti mencantumkan penjelasan istilah pada judul di atas, yakni sebagaimana defenisi berikut ini :

²⁷ Rabiatal Adawiyah, *Hak-Hak Suami yang Berstatus Narapidana Terhadap Gugat Cerai*, Jurnal UIN Antasari, 2015.

G. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

Dari penjelasan di atas, maka peneliti ingin mengambil judul “Penggunaan Hak Fasakh oleh Istri Narapidana 2 Tahun di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Menurut Hukum Islam“. Untuk memperjelas maksud dari judul penelitian ini dan untuk menghindari terjadinya kesalah fahaman maka peneliti mencantumkan penjelasan istilah pada judul di atas, yakni sebagaimana defenisi berikut ini :

Fasakh

Arti fasakh menurut bahasa ialah rusak atau putus. Fasakh berarti memutuskan pernikahan, perkara ini hanya diputuskan apabila pihak isteri membuat pengaduan kepada Mahkamah dan hakim. Menurut pendapat yang lain fasakh adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami-istri di sebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. misalnya suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan. Fasakh disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau baligh dan berakal.

Suami memiliki hak menalak, sedangkan bagi pihak istri disediakan lembaga fasakh. Dengan demikian, keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut suatu ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum. Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad berlangsung akad nikah atau hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.²⁸

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 105.



Adapun problema nikah fasakh ditinjau dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Mengenai pernikahan yang dapat dibatalkan menurut KHI adalah Apabila seorang suami yang telah dan masih mempunyai istri melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama. Apabila wanita yang dinikahi ternyata kemudian diketahui masih menjadi iatri laki-laki yang *mafqud*. Yaitu laki-laki yang masih sah menjadi suaminya. Apabila wanita yang dinikahnya ternyata masih dalam iddah dari suaminya yang terdahulu. Apabila terjadi suatu pernikahan yang melanggar batas umur minimal pernikahan. Sebagaimana ditetapkan pasal 7 UU No.1 th 1974 tentang perkawinan mengenai dispensasi nikah.²⁹

Dapat disimpulkan nikah fasakh ialah nikah yang dapat dibatalkan menurut Islam, karena ada persyaratan atau rukun yang tidak dipenuhi oleh salah satu pasangan, ada dua macam pernikahan fasakh ini dapat digolongkan yaitu pernikahan fasakh yang dapat tidak difasakhkan dan pernikahan yang harus difasakhkan, dalam sifatnya pernikahan fasakh ada beberapa macam yaitu batal karena aqad, ada juga batal karena niat, ada yang batal karena keadaan.

Dari telaah penelitian lapangan ini, tampak bahwa kajian-kajian terdahulu belum ada yang secara detail membahas tentang PENGGUNAAN HAK FASAKH OLEH ISTRI NARAPIDANA 2 TAHUN di LAPAS KELAS II-B PASIR PENGARAIAN MENURUT HUKUM ISLAM.

²⁹ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI, 2010), hal.40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Sistematika Penulisan

Dalam usaha mencari jawaban atas pokok permasalahan di atas, penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah. Selain itu juga memuat tujuan penelitian, manfaat penelitian, Metode penelitian, yang mencakup Jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

BAB II : Bab kedua, gambaran umum penelitian. Yang mencakup Pengertian Narapidana, hak-hak Narapidana, Larangan bagi Narapidana. Pengertian Lapas, Pola Pembinaan Pemasyarakatan, Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan, Tujuan Pembinaan, Faktor-Faktor Penghambat Pembinaan, dan Sejarah Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian

BAB III : Landasan teoritis tentang Fasakh, Narapidana, dan Lapas yang mencakup Pengertian Fasakh, Dasar Hukum, Syarat-syarat Fasakh, Sebab-sebab terjadinya Fasakh Nikah, Konsekwensi Hukum Fasakh, Konsekwensi Hukum Setelah Terjadi Fasakh, Perbedaan Talak dan Fasakh, Akibat Fasakh Nikah.



BAB IV : Hasil penelitian, yaitu alasan istri narapidana yang terpidana 2 tahun meminta fasakh kepada suami. Penyajian data emik pemahaman mengenai alasan istri narapidana yang terpidana 2 tahun meminta fasakh, serta analisis data dari masing-masing data yang diperoleh.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul tesis ini yang akan dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan dilengkapi dengan rekomendasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Lembaga Pemasyarakatan

1. Sejarah Lapas

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah DirektoratJendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lapas bisa Narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lapas di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Suhardjo pada tahun 1962. Sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.³⁰

Istilah Pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh almarhum Bapak Suhardjo, S.H (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 juli 1963

³⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Lem>
Oktober 2013

dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 april 1964 dalam konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti Kepenjaraan. Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk reintegrasi social atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan didalam masyarakat.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.³¹

2. Pola Pembinaan Pemasyarakatan

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit

³¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditamma, 2006), hal. 87.

menjadi seseorang yang baik. Maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat. Berdasarkan UU No. 12 tahun 1995 pembinaan narapidana dilaksanakan dengan sistem:³²

➤ Pengayoman

Pengayoman adalah perilaku terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.

➤ Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan-bedakan orang.

➤ Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa

³² *Ibid.*, hal. 88.

kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

➤ Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

➤ Kehilangan Kemerdekaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan (warga binaan tetap memperoleh hak-hak yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap di lindungi sepertinya hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, olah raga, atau rekreasi).³³

➤ Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga atau Orang tertentu. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu adalah warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

³³ Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hal. 88

dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.³⁴

Berdasarkan kepada Surat Edaran No. KP. 10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan Narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, antara lain:

1. Tahap Pertama.

Terhadap setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihwal dirinya, termasuk sebab-sebab Narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, di mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan bersatatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidanya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum (maksimum *security*).³⁵

2. Tahap kedua

³⁴ Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat, (Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2005), hal.1.

³⁵ Sudaryono & Natangsa Surbakti, Hukum Pidana, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), hal. 320.



Jika proses pembinaan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan *medium-security*.

3. Tahap ketiga

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya di perluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain:

- a. Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan setengah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium-security*
- b. Pada tahapan ini waktunya di mulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini Narapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum security*.³⁶

4. Tahap keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 (duapertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yang kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh balai pemasyarakatan yang kemudian disebut pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien Pemasyarakatan (Priyatno : 2009)

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa: pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan sedangkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.³⁷

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan:

³⁶ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT.RINEKA CIPTA, 2009), hal. 350.

³⁷ Adi Sujatno & Wan Nazari, Curah Pikir Dua Sahabat, (Jakarta: Team 7 AS, 2010), hal.29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Secara intramural (didalam Lembaga Pemasyarakatan)
- b. Secara ekstremural (diluar Lembaga Pemasyarakatan)

Pembinaan secara ekstremural yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan di Lapas disebut *asimilasi*, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi pesyaratan tertentu dengan membaurkan mereka kedalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstremural juga dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan yang disebut *integrasi*, yaitu proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan. Balai Pemasyarakatan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan adalah pegawai pemasyarakaatn yang melaksanakan tugas pembinaan pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.³⁸

Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengaman, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh menteri (sekarang menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dahulu Menteri Kehakiman) sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku (Pristiwati : 2009).

Hukum menurut Durkheim adalah kaidah-kaidah yang bersanksi berat-ringannnya tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan-anggapan serta

³⁸ Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. 2009), hal. 90.

keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan. Di dalam masyarakat banyak ditemukan dua macam sanksi kaidah-kaidah hukum yaitu sanksi *refresif* dan sanksi *restitutif*.³⁹

a. Kaidah hukum dengan sanksi *represif*

Kaidah hukum dengan sanksi *refresif* biasanya mendatangkan penderitaan bagi pelanggar-pelanggarnya. Sanksi tersebut menyangkut hari depan dan kehormatan seorang warga masyarakat atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya. Kaidah-kaidah hukum dengan sanksi demikian adalah hukum pidana.

b. Kaidah hukum dengan sanksi *restitutif*

Tujuan utama dari sanksi tersebut tidaklah perlu semata-mata untuk mendatangkan penderitaan. Tujuan utama kaidah-kaidah hukum ini adalah untuk mengembalikan keadaan pada situasi semula, sebelum terjadi kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum. Kaidah-kaidah tersebut antara lain mencakup hukum perdata, hukum dagang, hukum acara, hukum administrasi dan hukum tata Negara setelah dikurangi dengan unsure-unsur pidananya (Soekanto, 1982).⁴⁰

3. Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan.

Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi :

a. Sarana Gedung Pemasyarakatan

³⁹ Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana. (Jakarta: Djambatan, 1995), hal. 62.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Gedung Pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang terkesan "angker" dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan seram penghuninya.

b. Pembinaan Narapidana

Bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan ada sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi, atau kalau toh berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan barang-barang yang diproduksi di luar (hasil produksi perusahaan).⁴¹

c. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan. Kewajiban untuk mengeluarkan narapidana dari lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahanan negara untuk kembali

⁴¹ Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sarwoko, 1986.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemasyarakatan sangatlah penting. Berhasil tidaknya tugas untuk mengeluarkan dan mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum tergantung pada petugas-petugasnegara yang disertai tugas untuk menjalankan sistem pemasyarakatan.

Adapun petugas pemasyarakatan yang memiliki mental yang baik dan sehat harus memiliki 5 aspek yaitu:

1. Berpikir realitas
2. Mempunyai kesadaran diri
3. Mampu membina hubungan sosial dengan orang lain
4. Mempunyai visi dan misi yang jelas
5. Mampu mengendalikan emosi

Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk sistem pemasyarakatan dan terus menerus meningkatkan kemampuan, dalam menghadapi perangai narapidana. Petugas-petugas yang dimaksud dalam uraian tersebut melakukan peranan sesuai dengan kewenangannya yang ditunjuk oleh peraturan dan berusaha menciptakan bentuk kerjasama yang baik untuk membantu menyelenggarakan “proses pemasyarakatan” sedemikian rupa dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

4. Tujuan Pembinaan.

Perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kentaan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan

perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun narapidana juga manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.⁴²

Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai tampak sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan di Lembang, bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, jadi mereka yang jadi narapidana bukan lagi dibuat jera tetapi dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu :

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Sedangkan berdasarkan Konperensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang (Bandung) pada tanggal 27 April 1964, dirumuskan lebih lanjut tentang maksud dan tujuan pidana penjara sebagai berikut ini :

- a. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. yakni

⁴² Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 67



masyarakat Indonesia yang menuju tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, ketrampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga negara yang baik, tidak melanggar hukum agi dan berguna dalam pembangunan negara.

- b. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas denam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkannya kemerdekaan.
- c. Tobat tidak dapat dcapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapiana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa social dalam kehidupan bermasyarakat(Priyatno,2009).⁴³

5. Faktor-Faktor Penghambat Pembinaan.

a. Faktor Internal.

Dalam pelaksanaan pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian tersebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor internal yang menjadi

⁴³ Mangunhardjana, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta, Kanasius, 1986), hal, 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghambat berjalannya pola pembinaan tersebut berasal dari dalam diri narapidana itu sendiri antara lain:

1. Faktor Pendidikan.

Faktor pendidikan yang minim dari pelaku tindak kejahatan sehingga tidak mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri si pelaku. Sebagai contoh, seseorang yang berpendidikan formal hanya sampai tamat SD dibandingkan dengan seseorang yang tamat pendidikan formal SMA atau SMK, maka potensi pengembangan diri atau untuk mencari pekerjaan jauh lebih mudah yang tamatan SMA atau SMK dibandingkan yang tamatan SD.

2. Faktor Sifat dan Kepribadian.

Faktor sifat dan kepribadian yang ada dalam diri narapidana itu sendiri menjadi salah satu faktor penghambat yang cukup besar, mengingat perbedaan sifat, keseriusan dalam melaksanakan pembinaan, dan latar belakang yg berbeda-beda sangat mempengaruhi jalannya pembinaan, sehingga sulit untuk menentukan jenis pembinaan yang cocok bagi masing-masing narapidana.⁴⁴

- b. Faktor Eksternal.'

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian, selain faktor internal yang menjadi penghambat jalannya pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian, ada faktor eksternal yang juga menjadi penghambat jalannya pola pembinaan tersebut antara lain:

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sarana Gegung Lembaga Pemasyarakatan.

Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana karena dari semuanya hal tersebut tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Kualitas dan Kuantitas Petugas.

Adanya suatu usaha yang harus dilakukan agar kualitas dari para petugas Lembaga Pemasyarakatan mampu menjawab segala masalah dan tantangan yang selalu ada dan muncul di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan di samping penguasaan terhadap tugas-tugas yang rutin.

3. Sarana dan Fasilitas Pembinaan.

Adanya kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah mutu telah menjadi penghambat pembinaan bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan dan ketertiban. Hal tersebut merupakan tugas bagi semua pihak yang ada didalamnya baik itu Kepala Lembaga pemasyarakatan maupun staf yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, serta para narapidana atau tahanan untuk dapat merawat dan memelihara semua sarana dan fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

4. Anggaran Lembaga Pemasyarakatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan dan melaksanakan semua program pembinaan, namun hendaknya diusahakan sedapat mungkin untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdayaguna, agar pembinaan dapat berjalan dengan baik.

5. Kualitas dan Ragam Program Pembinaan.

Kualitas dari bentuk-bentuk program dari pembinaan tidak semata-mata di tentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Diperlukan program-program kreatif tetapi tidak mengeluarkan biaya yang terlalu mahal dalam pengerjaannya dan mudah cara kerjanya serta memiliki dampak yang edukatif yang optimal bagi warga binaan pemsarakatan (Pristiwati, 29).

Lembaga kelas II B Pasir Pengaraian didirikan sejak zaman pemerintahan colonial Belanda. Pada awal nya terletak pada jalan Riau No 1 kampung kelondong Pasir Pengaraian setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1985,1986. Lapas Pasir Pengaraian dipindahkan ke jalan Pengayoman no 33 kec Rambah kabupaten Rokan Hulu dan mulai dioperasikan pada tahun 1988. Lapas kelas II B Pasir Pengaraian mempunyai luas tanah 2110 m² luas bangunan 15.000 terdiri dari luas bangunan kantor 942 m² bloc hunian 1458 m². serta fasilitas kantor penunjang lainnya meliputi tempat ibadah masjid dn gereja, dapur umum poliklinik, aula kantor, bengkel kerja, kebun pertanian, peternakan dan



perikanan. Lapangan olahraga serta ruangan kunjungan bagi keluarga binaan tahanan.⁴⁵

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-19 PR.01.01 Tahun 2016 tanggal 11 Juni 2016 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2016- 2019, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah merupakan visi, misi dan tujuan yang harus dipedomani oleh Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan. Visi, misi dan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Visi

Menjadikan lapas yang propesional, akuntabel, sinergi transparan dan inofatif daam memberikan layanan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap warga binaan permasyarakatan.

Misi

-) Membangun karakter dan mengembangkan sikap ketaqwaan, sopan santun dan kejujuran pada diri warga binaan permasyarakatan.
-) Mewujudkan system perlakuan humanis yang memberikan rasa aman, nyaman, berkeadilan dan bertekad tanpa pungutan liar.
-) Melaksanakan pembinaan, perawatan pembimbingan untuk mengembalikan narapidana menjadi warga Negara yang aktif dan produktif ditengah-tengah masyarakat

⁴⁵ Brosur lapas kelas IIB Pasir Pengaraian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

) membangun karakter dan budaya bersih melayani, sopan santun dan jujur dalam melayani warga binaan Pemasyarakatan dan keluarga/warga masyarakat yang berkunjung.

2. Nilai-nilai Dasar

-) Belajar dengan kerangka acuan kerja tepat waktu, mengedepankan integritas dan etika profesi
-) Terjaminnya kemudahan dalam memperoleh informasi
-) Melaksanakan tugas dengan berprinsip efektif dan efisien serta dapat dipertanggung jawabkan
-) Saling mengisi dan melengkapi dalam mewujudkan tujuan organisasi
-) Mengedepankan gagasan-gagasan baru

3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan peraturan dan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M. HH-05.OT. 01 tahun 2011 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M. 01-PR. 07. 03 tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pasir Pengaraian menyelenggarakan fungsi:

-) Melakukan pembinaan narapidana /anak didik
-) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
-) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik
-) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas.⁴⁶

4. Tujuan

-) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan system pemasyarakatan
-) Terlindunginya dan terpeliharanya benda sitaan dan barang rampasan Negara
-) Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja
-) Terwujudnya keamanan dan ketertiban UPT pemasyarakatan
-) Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
-) Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.
-) Terwujudnya reintegrasi social WBP secara sehat dalam hidup, kehidupan, dan penghidupan.
-) Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi (menuju e-government).
-) Terpenuhinya kebutuhan dasar WBP.

5. Sasaran

a. Perspektif stakeholder

- 1) Meningkatnya kesadaran hukum WBP dan tahanan
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan pemasyarakatan

⁴⁶ Dokumen Lapas kelas II B Pasir Pengaraian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemasyarakatan
- 4) Meningkatnya produktifitas WBP menuju manusia mandiri yang berdaya guna

b. Perspektif proses internal

- 1) Meningkatkan standarisasi pelayanan pemasyarakatan
- 2) Meningkatkan koordinasi dan serba guna
- 3) Meningkatkan kualitas pengawasan internal pemasyarakatan
- 4) Meningkatkan partisipasi public dalam mendorong reintegrasi sosial

c. Perspektif pengembangan organisasi

- 1) Mengembangkan kompetensi, integritas, profesionalisme dan etos kerja petugas pemasyarakatan
- 2) Mengembangkan iklim dan budaya kerja yang kondusif
- 3) Optimalisasi proses pemasyarakatan berbaris teknologi informasi

d. Anggaran

- 1) Peningkatan akuntabilitas.⁴⁷

Dalam rangka meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian pada tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

-) Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban
-) Melaksanakan inspeksi mendadak / razia secara berkala maupun insidentil yang dilaksanakan oleh Tim Satgas Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian

⁴⁷ Dokumen Lapas kelas II B Pasir Pengaraian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-) Melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian
-) Perawatan dan pergantian rutin gembok
-) Melaksanakan kegiatan P4GN.⁴⁸

Remisi online merupakan proses pengusulan remisi secara online melalui tahapan-tahapan di fitur-fitur remisi online yang sudah tersedia pada aplikasi SDP di UPT yang bertujuan untuk mempercepat proses pengusulan sampai dengan terbitnya otorisasi surat keputusan guna lancarnya pemberian hak kepada Warga Binaan Pemasyarakatan

Remisi online merupakan proses pengusulan remisi secara online melalui tahapan-tahapan di fitur-fitur remisi online yang sudah tersedia pada aplikasi SDP di UPT yang bertujuan untuk mempercepat proses pengusulan sampai dengan terbitnya otorisasi surat keputusan guna lancarnya pemberian hak kepada Warga Binaan Pemasyarakatan

Kunjungan masyarakat kepada keluarga, saudara atau teman yang sedang menjalani pidana di Lapas Kelas II B Kota Agung dilakukan dengan proses berbasis IT menggunakan aplikasi SDP

6. Industri Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian

a. Industri Pertanian

Industri pertanian di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian berada di dalam Lapas, yang mana perkebunan ini menanam berbagai macam sayur

⁴⁸ Brosur lapas kelas IIB Pasir Pengaraian



seperti kangkung, timun, terong dll. Sedangkan kebun luar menanam singkong, pepaya, jagung, pisang dll.

b. Industri Peternakan

Industri Peternakan di Lapas Pasir Pangaraian memproduksi telur dari bebek petelur

c. Industri Biker

Industri Biker di Lapas Pasir Pangaraian memproduksi kursi, meja, lemari dll.

d. Industri Kreatif

Industri Kreatif di Lapas Kotaagung salah satunya membuat miniatur motor menggunakan barang bekas

7. Kegiatan Sosial Lapas Pasir Pangaraian

a. Bakti sosial

b. Donor darah

8. Perubahan Nyata

a. Ruang tunggu pendaftaran

a. Ruang kunjungan

b. Ruang komandan dan jaga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

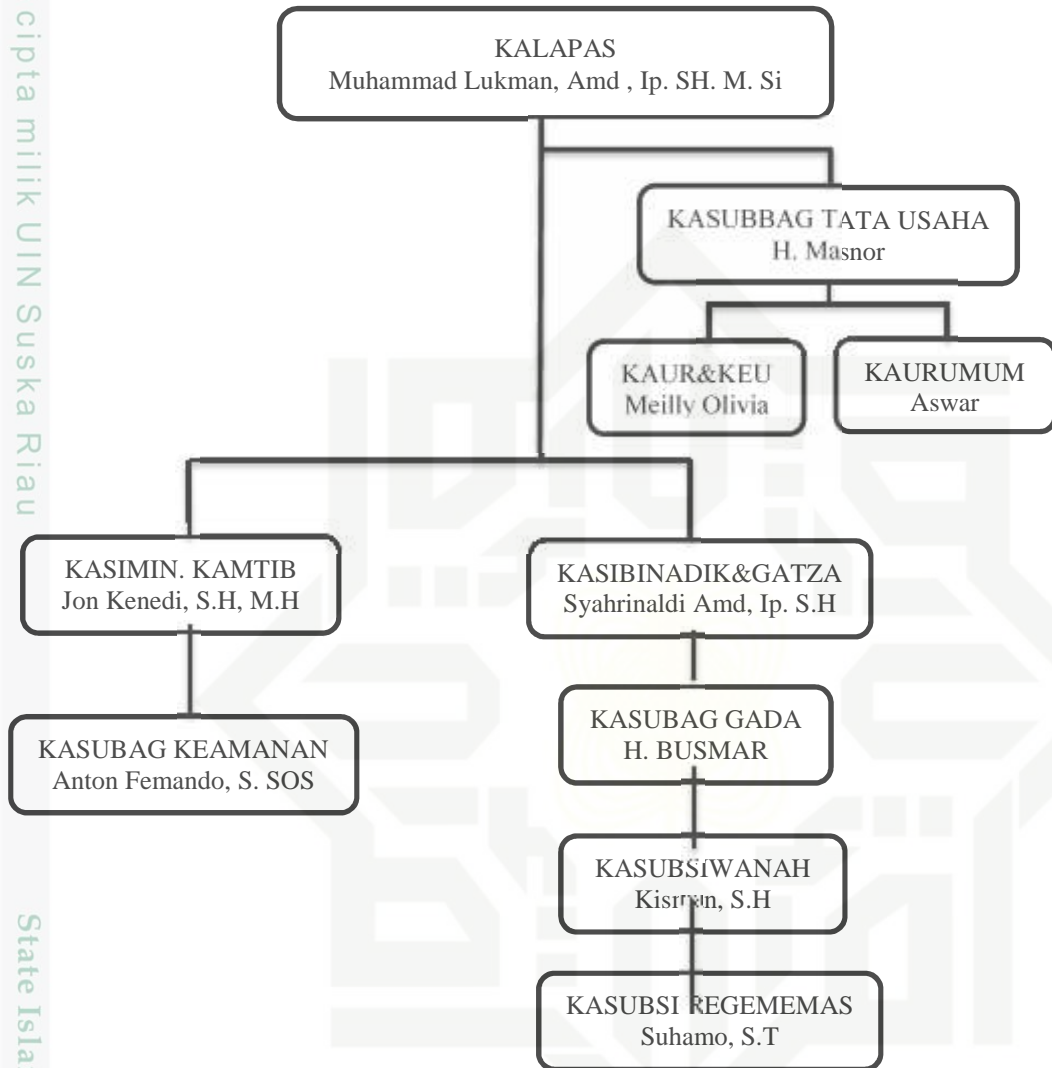
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



STRUKTUR ORGANISASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

PUTUSNYA PERKAWINAN

1. Talak

a. Pengertian Talak

menurut bahasa Arab, kata talak bermakna pelepasan atau penguraian tali pengikat. Sedangkan menurut istilah hukum Islam menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan yang demikian tadi diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil, kemungkinannya daripada apabila hak talak diberikan kepada isteri. Di samping alasan ini, ada alasan lain yang memberikan wewenang/hak talak pada suami, antara lain:⁴⁹

- a. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak isteri waktu dilaksanakan akad nikah.
- b. Suami wajib membayar mahar kepada isterinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang mu'tah (pemberian sukarela dari suami kepada isterinya) setelah suami mentalak isterinya.
- c. Suami wajib memberi nafkah isterinya pada masa iddah apabila ia mentalaknya.

⁴⁹ Ahmad Shiddiq, *Hukum Talak Dalam Agama Islam*. (Surabaya:Putra Pelajar, 2001), hal. 56.

- d. Perintah-perintah mentalak dalam Al-Quran dan Hadist banyak ditujukan pada suami.⁵⁰

b. Syarat-syarat dan Rukun Talak

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak. Adapun rukunnya yaitu

1. Suami
2. Istri
3. Sighat Talak
4. Qasdu (sengaja)
5. wilayah

Seperti kita ketahui bahwa talak pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan/dibenarkan, maka untuk sahnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah:

1. Berakal sehat
2. Telah baliqh
3. Tidak karena paksaan

Para ahli Fiqh sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah dewasa/baliqh dan atas kehendak sendiri bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga.

Syarat-syarat seorang isteri supaya sah ditalak suaminya ialah:

⁵⁰ Husain Az-zihabi, *Asy-syari'ah al-islamiyyah*, (Mesir: Dar at-Ta'lif, 1998), cet. Ke-2, hal. 236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Isteri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya. Apabila akad-nikahnya diragukan kesahannya, maka isteri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya.
- d. Isteri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu.⁵¹

Syarat-syarat pada sighat talak:

Sighat talak ialah perkataan/ucapan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya di waktu ia menjatuhkan talak pada isterinya. Sighat talak ini ada yang diucapkan langsung, seperti "*saya jatuhkan talak saya satu kepadamu*". Adapula yang diucapkan secara sindiran (kinayah), seperti "*kembalilah ko orangtuamu*" atau "*engkau telah aku lepaskan daripadaku*". Ini dinyatakan sah apabila:

- a. Ucapan suami itu disertai niat menjatuhkan talak pada isterinya.
- b. Suami mengatakan kepada Hakim bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan talak kepada isterinya. Apabila ucapannya itu tidak bermaksud untuk menjatuhkan talak kepada isterinya maka sighat talak yang demikian tadi tidak sah hukumnya.⁵²

c. Macam-macam Talak

1. Talak Sunny
2. Talak bid'iy

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, jilid2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), hal. 268.

⁵² *Ibid.*, hal 269.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Talak la Sunny wa la bid'iy

2. Khuluk

a. Pengertian Khuluk

Khuluk atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami-isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.

Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan khuluk ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan khuluk ini si isteri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan. Penebusan atau pengganti yang diberikan isteri pada suaminya disebut juga dengan kata "*iwald*".

b. Syarat sahnya khuluk ialah:

- a. Perceraian dengan khuluk itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami-isteri.
- b. Besar kecilnya uang tebusan harus ditentukan dengan persetujuan bersama antara suami-isteri.

Apabila tidak terdapat persetujuan antara keduanya mengenai jumlah uang penebus, Hakim Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah uang tebusan itu. Khuluk dapat dijatuhkan sewaktu-waktu, tidak usah menanti isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ini disebabkan karena khuluk itu terjadi atas kehendak isteri sendiri.⁵³

4. Fasakh

a. Pengertian Fasakh

Fasakh artinya putus atau batal. Menurut bahasa kata “*fasakh*” berasal dari bahasa arab – يفسخ – yang berarti batal atau rusak.⁵⁴

Arti fasakh menurut bahasa ialah rusak atau putus. Fasakh berarti memutuskan pernikahan, perkara ini hanya diputuskan apabila pihak isteri membuat pengaduan kepada Mahkamah dan hakim. Menurut pendapat yang lain fasakh adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami-istri di sebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. misalnya suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan. Fasakh disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau baligh dan berakal.

Suami memiliki hak menalak, sedangkan bagi pihak istri disediakan lembaga fasakh. Dengan demikian, keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut suatu ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum. Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad berlangsung

⁵³ Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hal. 50.

⁵⁴ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 92 .



akad nikah atau hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.⁵⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fasakh nikah adalah suatu bentuk perceraian yang putus hakim karena adanya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami-isteri sehingga tujuan pernikahan tidak dapat terwujud.⁵⁶

Fasakh disebut juga dengan batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan. Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah membatalkan atau memutuskan ikatan hubungan antara suami dan istri.⁵⁷

Menurut Amir Syarifuddin, fasakh berarti putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.⁵⁸

Hikmah boleh dilakukannya fasakh itu adalah memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang sedang dan telah menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa perkawinan itu mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan *sakinah*, atau perkawinan itu akan merusak hubungan antara keduanya. Atau dalam masa perkawinannya itu ternyata bahwa keduanya mestinya tidak mungkin melakukan perkawinan,

⁵⁵ Ahmad Ghundur, *At-Talaq Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, Wa' al-Qonun*, (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1967), cet. Ke-1, hal. 236.

⁵⁶ Taqiy Ad-Din Abi Bakr, *Kifayah Al-Ahyar*, Juz 1, (Indonesia: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arobiyyah, t-th), hal. 110.

⁵⁷ Abdul Rahman Ghodzali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 142.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 197.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun kenyataannya telah terjadi. Hal-hal yang memungkinkan mereka keluar dari kemelut itu adalah perceraian.⁵⁹

Salah satu bentuk terjadinya fasakh adalah adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Bentuk ini disebut dengan *syiqaq*. Ketentuan tentang *syiqaq* dapat ditemukan dalam firman Allah pada surat An-nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Anisa': 35)*

b. Dasar Hukum Fasakh

Sumber hukum dalam agama Islam adalah al-Qur'an dan hadits, sebagai sumber hukum yang kuat dalam menjawab berbagai problematika dalam kehidupan. Percerian secara *fasakh* tidak dinyatakan secara terang di dalam al-Qur'an. Tetapi prinsipnya boleh dilihat dalam Surah al-Baqarah ayat 231 dan an-Nisa' ayat 35.⁶⁰

Firman Allah dalam al-Qur'an:

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 197

⁶⁰ Raihanah Haji Abdullah, "Alasan Membubarkan Perkawinan Melalui Fasakh, "Blog Raihanah Haji Abdullah, <http://eskapisminda.blogspot.com/2019/fasakh.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبُغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَقْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ⁶¹

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka untuk maksud jahat untuk mendzalimi mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Al hikmah (As Sunnah). Untuk memberi pengajaran kepadamu. dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah : 231).

Firman Allah

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا⁶²

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. jika kedua orang juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisa: 35)

Firman Allah:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

⁶¹ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Jumanatul 'Ali 2005), hal. 29.

⁶² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bogor, PT Sigma Examedia Arkanleema, 2007), hal. 35.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۖ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٣﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir (wali) bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Baqarah: 229)

Hukum islam tidak menghendaki adanya kemadharatan dan melarang saling menimbulkan kemadharatan. Dalam hadist dinyatakan bahwa:

عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه ان رسول
عليه و سلم قال : لا
(اخرجه مالك)⁶³

“Dari Amr bin Yahya Al-Maziny dari bapaknya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemadharatan” (H.R. Malik). Menurut qaidah islam, bahwa setiap kemadharatan itu wajib dihilangkan, sebagaimana qaidah:

اضرري⁶⁵
“Madharat itu dapat dihapus”

⁶³ Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Jumanatul 'Ali Art, 2005), hal. 350.

⁶⁴ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatto*, (Beirut: Dar Al-Fikir, 1989), cet. Ke-1. hal. 489.

⁶⁵ Jalal Ad-din, Assuyuthi, *Al-Asybah wa an-nadair fi Al-Furu'*, (Dar Al-Fikr, t.th), hal.

Berdasarkan firman Allah SWT, hadist qaidah tersebut para fuqaha menetapkan bahwa, jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita madarat dapat mengambil prakarsa untuk putusny pernikahan kemudian hakim menfasakhkan pernikahan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.⁶⁶

Di atas telah disebut di dalam al-Qur'an dengan jelasnya. Walau bagaimanapun, *fasakh* diterima sebagai salah satu cara untuk membubarkan perkawinan berasaskan kepada prinsip yang terkandung dalam hadits Nabi S.A.W. yang berbunyi: "*La darar wa la dirar*" artinya "tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan." Pembubaran perkawinan melalui *fasakh* memerlukan campur tangan kadi (hakim) atas sebab-sebab yang biasanya diketengahkan oleh seorang istri. Karena itu sebagai contohnya Abu Zahrah menggunakan istilah *al-Thalaq bi al-Hukm al-Qadi*. Walaupun suami juga boleh menuntut *fasakh* namun suami mempunyai hak eksklusifnya yaitu *thalaq*. *Fasakh* yang dituntut oleh istri ini mempunyai beberapa sebab yang telah ditetapkan oleh para Fuqaha. *Fasakh* dan *thalaq* ini sudah jelas berbeda terutama dalam efek pembubaran itu dimana *fasakh* tidak terhadang kepada halangan tertentu, berbanding dengan *thalaq* yang terhadang kepada dua (*thalaq raj'i*).

Dengan kata lain suami istri yang terputus perkawinannya melalui metode *fasakh* boleh kembali kepada istri dan suami yang sama untuk sekian

⁶⁶ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Pusat, *Op. Cit*, hal. 270.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalinya dengan membuat aqad dan mas kawin yang baru. Bagaimanapun *fasakh* yang jatuh dalam kategori selama-lamanya seperti *fasakh* perkawinan saudara kandung atau sesusuan dan juga murtad tidak boleh kembali untuk menikah. *Fasakh* karena sebab-sebab ini tidak perlu ada campur tangan Hakim. Tetapi bagi masyarakat Islam Indonesia, secara yuridis formilnya, untuk memperoleh pembuktian tentang putusnya perkawinan dan termasuk masalah *fasakh* ini dan pengakuan sahnya menurut undang-undang harus ditempuh melalui pengadilan agama. Ini mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh, baik terhadap suami istri, maupun terhadap keluarganya. Maka melalui proses pengadilan ini dimaksudkan supaya untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain diluar pengadilan. Dalam peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 pasal 37 tercantum bahwa: batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Pada dasarnya hukum *fasakh* itu adalah *mubah* atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang, namun bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu.⁶⁷

Yang dimaksud keadaan tertentu di atas adalah terdapatnya beberapa factor yang membolehkan untuk melakukan *fasakh*, diantaranya: *syiqaq* (pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan), *fasakh* karena cacat, *fasakh* karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, *fasakh* karena suami meniggalkan tempat tetapnya dan pergi entah kemana dalam

⁶⁷ <http://nurisrns1.blospot.com/2013/12/perceraian-gugatan-isteri-fasakh.html>

jangka waktu yang sudah lama, dan fasakh karena melanggar perjanjian dalam perkawinan.

Terdapat beberapa hadits yang dijadikan tempat berpijaknya dasar hukum fasakh dalam perkawinan, namun pada tesis ini, penulis hanya mengutip satu hadits yang diriwayatkan oleh H.R Ahmad yaitu:

عن جميل بن زيد بن كعب ان رسول الله ﷺ تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشجها بياضا فنحاز عن الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما أتاهاشيئا.⁶⁸ ()

Artinya: *Dari Jamil bin Zaid bin Ka'ab r.a bahwasanya Rasulullah SAW pernah menikahi seorang perempuan bani gafar, maka tatkala ia akan bersetubuh dan perempuan itu yang telah meletakkan kainnya, dan ia duduk di atas pelaminan, kelihatannya putih (balak) dilambunginya lalu ia berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata, "ambillah kain engkau, tutupilah badan engkau, dan beliau telah mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu" (HR. Ahmad).*

c. Syarat-syarat fasakh

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. Berikut adalah penjabarannya.⁶⁹

- Fasakh (batalnya perkawinan), karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.
- Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.

⁶⁸ Malik, Muwatha' Malik, 1974, (Beirut; Daar al-Fikr), Ket. Ke-3, hal. 298.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 133-134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa, ia berhak memutuskan untuk meneruskan atau mengakhiri perkawinannya.

2. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad.

- a. Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali ke agama Islam,
- b. Jika suami yang tadinya kafir masuk islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh).⁷⁰

d. Sebab-sebab terjadinya Fasakh (batalnya perkawinan)

Selain faktor-faktor diatas yang menyebabkan terjadinya gugatan isteri (fasakh), adapula penyebab lain adalah sebagai berikut:

1. Syiqaq

Salah satu bentuk terjadinya fasakh ini adalah adanya pertengkaran antara suami-istri yang tidak mungkin didamaikan. Bentuk ini disebut *syiqaq*. Ketentuan tentang *syiqaq* terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisa: 35).*

2. Fasakh karena cacat

⁷⁰ Ibid., hal. 134.



Yang dimaksud cacat disini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau rohani atau jiwa. Seperti: balak (penyakit belang kulit), gila, canggu (penyakit kusta), penyakit menular (TBC, sipilis, dll), ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan, unah, yaitu zakar atau impoten (tidak hidup untuk jima'). Ada atsar sahabi yang berasal dari Umar bin Khattab dari Said bin al-Musayyab yang berbunyi:

قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجونة فلها الصداق بمسبسه إياها⁷¹

Artinya: Umar bin Khattab berkata:” Laki-laki mana saja yang mengawini perempuan dan bergaul dengannya, menemui pada perempuan itu penyakit sopak, gila atau kusta, maka berikanlah maharnya karena telah bergaul dengannya (artinya setelah keduanya dipisahkan).”

3. Fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah

Suami selama dalam masa perkawinan berkewajiban memberi nafkah untuk istrinya, baik dalam bentuk sandang, pangan maupun papan. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin saja terjadi suami kehilangan sumber pencahariannya sehingga dia tidak dapat menjalankan kewajibannya, sehingga kehidupan rumah mulai terancam. Ada sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah:

أن النبي ﷺ في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما⁷²

Artinya: Bahwasanya Nabi SAW. Berbicara tentang seorang laki-laki yang tidak memperoleh sesuatu untuk nafkah istrinya dan mengatakan: “diceraikan diantara keduanya”.

4. Fasakh karena suami ghaib (al-mafqud)

⁷¹ Abu Malik Kamal bin as sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta : PustakaAzzam, 2007), Jilid III, hal. 635.

⁷² *Ibid.*, hal. 636

Yang dimaksud dengan suami gaib disini adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui dimana perginya dan dimana beradanya dalam waktu yang sudah lama. Gaibnya suami dalam bentuk menyulitkan istrinya. Ada sebuah pendapat sahabat Ibnu Mas'ud bahwa: *hakim tidak boleh memutuskan perkawinan tersebut. Istri suami yang gaib itu masih terikat dengan suaminya sampai ada keyakinan tentang kematiannya.*

5. Fasakh karena melanggar perjanjian dalam perkawinan

Bila terjadi pelanggaran janji, dalam kasus *ta'liq thalaq* umpamanya suami yang meninggalkan istrinya selama masa tertentu dan tidak memberi nafkah dalam masa itu; istri tidak rela dengan kenyataan itu, istri mengajukannya ke pengadilan untuk memperoleh perceraian dari pengadilan. Inilah salah satu bentuk dari penyelesaian pelanggaran perjanjian dalam perkawinan dalam bentuk *fasakh*.⁷³

Disamping itu, fasakh bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut:⁷⁴

1. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, umpamanya: budak dengan merdeka, orang pezina dengan orang terpelihara dan sebagainya.
2. Suami tidak mau memulangkan istrinya, dan tidak pula memberi belanja sedangkan istrinya tidak rela.
3. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak sanggup lagi memberi

⁷³ http://referensi_makalah.com/2012/08/pengertian-data-dan-fakta-dalam.html

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, jilid2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), hal. 268.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

60

nafkah, baik pakaian yang sederhana, tempat ataupun maskawinnya belum dibayarkannya sebelum campur.

Di kalangan ulama' terjadi perbedaan pendapat mengenai waktu pelaksanaannya *fasakh* akad nikah. Abdurrahman Al-Zajiri mengemukakan pendapat ulama' Hanabilah bahwa apabila suami murtad bersama-sama setelah *dukhul* atau sebelum *dukhul*, nikahnya batal dan harus diceraikan. Dan tidak putus nikahnya sebelum masa iddahnya habis, sehingga diantara masih ada waktu untuk bertobat. Apabila masih tetap dalam kemurtadannya pernikahannya *fasakh*.⁷⁵

Ulama' Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah menurut Hasbi Ash-Shidiqie dalam suatu riwayat mengatakan jika dari salah satu suami atau istri murtad, perceraian harus disegerakan demi menjaga tauhid dari salah satunya. Jika yang murtad adalah suaminya yang lebih kuat mengajak istrinya untuk ikut murtad. Perceraian disebabkan oleh alasan kemurtadan tersebut dan bukan alasan lainnya.

Dalam penyelesaian proses penyelesaian masalah *fasakh* terdapat persyaratan-persyaratan tertentu yaitu:⁷⁶

1. Mengajukan perkara kepada hakim atau pengadilan
2. Keadaan suami sudah mukallaf.
3. Pihak istri keberatan dengan keadaan suaminya yang mengalami impoten atau murtad, demikian pula pihak suami merasa kemurtadan istri dan berbagai penyakit yang dideritanya.

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 108-109.

⁷⁶ <http://pendidikan.blogspot.com/2011/05/pengertian-fasakh.html>.

Di Indonesia, masalah pembatalan perkawinan diatur dalam kompilasi hukum islam (KHI) sebagai berikut:

1. Seorang suami dan isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pernikahan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami dan istri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pada waktu berlangsungnya pernikahan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, maka bersalah sangka itu menyadari keadannya, dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Adapun yang berhak mengajukan permohonan pembatalan pernikahan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri
2. Suami dan istri
3. Pejabat yang berwenang mengatasi pelaksanaan pernikahan menurut undang-undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.⁷⁷

Masa pelaksanaan *fasakh*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Imam Syafi'i berkata, "Harus menunggu selama tiga hari." sedangkan Imam Malik mengatakan, "Harus menunggu selama satu bulan." Dan Imam Hambali mengatakan "Harus menunggu selama satu tahun." Semua itu maksudnya adalah selama masa tersebut laki-laki boleh mengambil keputusan akan bercerai atau memberikan nafkah bila istri tidak rela lagi.

Kalau si istri mau menunggu, dan rela dengan ada belanja dari suaminya, maka tidak perlu di *fasakhkan* sebab nafkah itu adalah haknya. Bunyi lafal *fasakh* itu umpamanya: "Aku *fasakhkan* nikahmu dari suamimu yang bernama ... bin ... pada hari ini." *Fasakh* itu dilakukan oleh istri sendiri dimuka hakim, maka ia berkata: Aku *fasakhkan* nikahku dari suamiku yang bernama ... bin ... pada hari ini." Setelah *fasakh* itu dilakukan, maka perceraian itu dinamakan talak ba'in. Kalau suami hendak kembali kepadanya, maka harus dengan nikah lagi dengan akad baru. Sedang iddahnya sebagai iddah talak biasa.

Suami memiliki hak *menalaq*, sedangkan istri disediakan lembaga *fasakh*. Dengan demikian, keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut suatu ikatan rumah tangga karena adanya sebab

⁷⁷ Zainal Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), hal. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu yang dibenarkan menurut hukum. Fasakh bisa terjadi karna tidak terpenuhinya syarat ketika akad nikah berlangsung atau hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.⁷⁸

e. Pelaksanaan Fasakh

Apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab fasakh itu jelas, dan dibenarkan syara'. Maka untuk menetapkan fasakh tidak diperlukan putusan pengadilan. Misalnya, terbukti bahwa suami istri masih saudara kandung, saudara susuan, dan sebagainya. Akan tetapi, bila terjadi hal-hal seperti berikut, maka pelaksanaannya adalah:

1. Jika suami tidak memberi nafkah bukan karena kemiskinannya sedang hakim telah pula memaksa ia untuk itu. Dalam hal ini hendaklah diadakan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, seperti: Qadi nikah di Pengadilan Agama, supaya yang berwenang dapat menyelesaikannya sebagaimana mestinya, seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَمْرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رَجُلٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطْلَقُوا , فَإِنْ طَلَفُوا
ة مَا حَبَسُوا. وَهَذَا يُثْبِتُهُ مَا وَصَفْتُ⁷⁹

Artinya: "Dari Umar r.a bahwa ia pernah menulis surat kepada parapanglima perang mengenai para suami yang jauh istrinya, (dalam surat tersebut) beliau menginstruksikan kepada mereka agar mengultimatum para suami dengan dua adopsi: antara memberikan nafkah kepada para istri atau menceraikannya. Kemudian apabila para suami itu memilih menceraikan para istri, mereka harus

⁷⁸ Beni Ahmad Sabani, Fikih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.105.

⁷⁹ Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1393 H, Juz VII), hal. 121.

mengirimkan nafkah yang belum mereka berikan selama meninggalkannya. , berkirim surat kepada pembesar-pembesar tentara, tentang laki-laki yang telah jauh dari isteri-isteri mereka supaya pemimpin-pemimpin itu menangkap mereka agar mereka mengirimkan nafkah, atau menceraikan isterinya. Maka bila mmreka telah menceraikannya, hendaklah mereka kirim semua nnafkah yang telah mereka tahan". (H.R. Umar bin Khottob)

2. Setelah hakim memberi janji kepadanya sekurang-kurangnya tiga hari mulai dari hari istri mengadu.

Bila masa perjanjiann itu telah habis, sedangkan si suami tidak juga dapat menyelesaikannya, barulah hakim memfasakhkan nikahnya. Atau dia sendiri yang memfasakhkan di muka hakim setelah diizinkan olehnya.

Di Indonesia, masalah pembatalan perkawinan diatur dalam kompilasi hukum Islam sebagai berikut:

1. Seorang suami dan isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pernikahan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami dan isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pada waktu berlangsungnya pernikahan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.⁸⁰
3. Apabila ancaman telah berhenti, maka bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang berhak mengajukan permohonan pembatalan pernikahan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang mengatasi pelaksanaan pernikahan menurut undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan pembatalan pernikahan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri, atau tempat pernikahan berlangsung.
2. Batalnya suatu pernikahan dimulai setelah Putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya pernikahan.⁸¹

f. Konsekwensi Hukum Fasakh

Akibat hukum yang ditimbulkan akibat putusnya perkawinan secara fasakh adalah suami tidak boleh ruju' kepada mantan istrinya selama istrinya masih menjalani masa iddah, hal ini disebabkan karena perceraian

⁸¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 79-81.

yang terjadi secara fasakh ini berstatus *ba'in sughra*. Apabila mantan suami dan mantan istri berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya kembali, mereka harus melakukan akad nikah yang baru, baik dalam waktu mantan istri sedang dalam masa iddah maupun setelahnya.⁸²

Akibat yang lain dari fasakh itu adalah tidak mengurangi bilangan thalaq. Hal ini menunjukkan bahwa hak si suami untuk men-thalaq istrinya maksimal adalah tiga kali, maka tidaklah berkurang dengan adanya fasakh. Dalam bahasa sederhana, fasakh boleh terjadi berkali-kali tanpa batas.⁸³

Pada dasarnya fasakh itu dilakukan oleh hakim atas permintaan dari suami atau dari istri. Namun adakalanya fasakh itu terjadi dengan sendirinya tanpa memerlukan hakim, seperti suami istri ketahuan senasab atau sepersusuan.⁸⁴

Dalam penyelesaian proses penyelesaian masalah fasakh terdapat persyaratan persyaratan tertentu yaitu:

1. Mengajukan perkara kepada hakim atau pengadilan.
2. Keadaan suami sudah mukallaf.
3. Pihak istri keberatan dengan keadaan suaminya yang mengalami impoten atau murtad, demikian pula pihak suami merasa kemurtadan istri dan berbagai penyakit yang dideritanya.

Di Indonesia, masalah pembatalan perkawinan diatur dalam kompilasi hukum islam (KHI) sebagai berikut:

⁸² Slamet Abidin, dan Aminudin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 81.

⁸³ Ahmad Rofiqoh, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), cet. Ke-1, hal. 316

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 317.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Seorang suami dan isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pernikahan dilangsungkan di bawah ancaman melanggar hukum.
- b. Seorang suami dan istri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pada waktu berlangsungnya pernikahan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, maka bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Adapun yang berhak mengajukan permohonan pembatalan pernikahan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
2. Suami dan isteri.
3. Pejabat yang berwenang mengatasi pelaksanaan pernikahan menurut undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.⁸⁵

⁸⁵ <http://pandidikan.blogspot.com/2011/05/pengertian-fasakh.html>

Konskwensi Hukum Setelah Terjadi Fasakh

Akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadi fasakh adalah hukum *thalaq ba'in sughra*, dimana si suami boleh melanjutkan perkawinannya kembali dengan mantan istrinya dengan akad nikah yang baru tanpa memerlukan muhallil, baik dalam masa iddah si istri maupun tidak. Setelah pernikahan berlangsung, di kemudian hari diketahui bahwa suami istri adalah saudara sekandung, seayah seibu atau saudara sepersusuan. Kemudian apabila ayah atau kakek menikahkan anak laki-laki atau perempuan di bawah umur dengan orang yang juga di bawah umur. Maka setelah kedua anak ini dewasa mereka berhak untuk memilih melanjutkan pernikahan tersebut atau menghentikan pernikahan itu. Apabila anak itu menghentikan pernikahan tersebut, maka dinamakan fasakh. Hak pilih seperti ini oleh ulama fikih tersebut *khiyar al-Bulug*.

Sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah terjadinya pemutusan perkawinan secara fasakh, maka tidak dikenal hukum *thalaq raj'i* dan tidak pula dikenal *thalaq bid'iy*. Hal ini disebabkan karena apabila *thalaq raj'i*, si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melakukan nikah yang baru, sedangkan pada fasakh, si suami boleh kembali dengan mantan istrinya harus dengan akad yang baru.⁸⁶

Begitu pula halnya dengan *thalaq bid'iy*, yaitu *thalaq* yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan berhadats, hal ini sebenarnya adalah hal yang

⁸⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, (Jakarta :Bulan Bintang, 1993), hal. 212.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilarang dalam agama Islam, sehingga apabila hal ini terjadi maka wajib hukumnya bagi suami untuk ruju' kembali dengan istrinya. Sedangkan padafasakh, tidak adanya ketentuan yang demikian, karena fasakh memerlukan akad baru dalam hal melanjutkan ikatan perkawinan antara suami dan mantan istrinya.

Fasakh yang semula dapat membatalkan akad, maka disini timbul beberapa ketentuan hukum misalnya: tidak ada kewajiban, mahar, haram kawin untuk selama-lamanya, bila fasakh itu terjadi dengan mahram. Disamping itu tidak mesti menunggu keputusan hakim. Namun dalam kasus-kasus lain biasanya lebih banyak harus diputuskan oleh hakim. Disini juga, perceraian tidak dihubungkan dengan masa *iddah*. Akan tetapi, pada fasakh karena sebab yang datang setelah akad, maka jika itu dari isteri sebelum ditentukan mahar, maka mahar itu gugur seluruhnya. Akan tetapi, jika fasakh itu dari suami maka ia wajib membayar setengah dari mahar itu. Disini perceraian itu sifatnya sementara dan dihubungkan dengan masa *iddah*.⁸⁷ Adapun masa *iddahnya* berlaku seperti *iddah* talak.⁸⁸

Disamping itu, baik bentuk fasakh yang pertama atau kedua, menyebabkan perceraian, umumnya terdapat pada saat itu juga. Ketentuan hukum yang lain ialah bahwa perceraian dengan jalan fasakh

⁸⁷ Depag RI, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, op.cit, hal. 285

⁸⁸ Ahmad Rofiqoh, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), cet. Ke-1, hal. 316.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mengurangi jumlah talak.⁸⁹ Dan bekas isteri tidak boleh dirujuk oleh bekas suaminya. Jika suami mau mengambil isterinya itu kembali, maka suami tersebut harus menikah lagi.

h. Perbedaan Talak dan Fasakh

No	TALAK	FASAKH
1	Talak ialah pembubaran ikatan perkawinan dengan lafal talak.	Fasakh berarti memutuskan pernikahan tanpa menjatuhkan talak,
2	Perceraian boleh dilakukan dengan lafal <i>sharih</i> (jelas) dan lafaz <i>kinayah</i> (sindiran), begitu juga perceraian boleh dilakukan dengan talak raj'i atau talak ba'in.	Sedangkan pembubaran perkawinan secara fasakh hanya boleh diputuskan oleh hakim di mahkamah
3	Berpisahnya suami istri akibat talak tidak mengakhiri ikatan suami istri secara seketika. Karena dalam talak ada talak ba'in dan talak raj'i, talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika. Sedangkan talak ba'in mengakhirinya seketika itu juga.	Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang datang belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu.
4	Pisahannya suami istri yang diakibatkan talaq dapat mengurangi bilangan talak itu sendiri. Jika suami menalak isterinya dengan talak raj'i kemudian kembali pada masa iddahnya, atau akad lagi setelah habis masa iddahya dengan akad baru, maka perbuatan terhitung satu talak, yang berarti ia masih ada kesempatan dua kali talaq lagi.	Sedangkan pisah suami istri karena fasakh, hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, meskipun terjadinya fasakh karena <i>khiyar baligh</i> , kemudian kedua suami istri tersebut menikah dengan akad baru lagi, maka suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali talaq.
PERBEDAAN DARI SEGI HAKIKAT		
	Talak (kecuali talak ba'in kubra) adalah pengakhiran akad tanpa kesan menghilangkan kebolehan	Fasakh adalah pembatalan akad dari segi dasarnya, dan berkaitan bagi menghilangkan hukum

⁸⁹ Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1968), hal. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	TALAK	FASAKH
	(hak) untuk melakukan hubungan (kembali).	yang timbul karenanya.
	PERBEDAAN KARENA PENGARUHNYA	
	Penjatuhan talak akan mengurangi jumlah bilangan yang ada pada suami	Peristiwa fasakh tidak mengurangi bilangan-bilangan talak yang dimiliki suami

Pendapat Malik *rahimahullah* tentang perbedaan antara fasakh yang tidak dihitung dalam jumlah thalak tiga dan thalak yang dihitung dalam jumlah thalak tiga, terbagi menjadi dua pendapat:

Pertama, bahwa suatu pernikahan meskipun di dalamnya terdapat perbedaan yang berada di luar madzhabnya (maksudnya, tentang dibolehkannya) sementara perbedaan tersebut terkenal, maka perceraian itu menurutnya adalah thalak, seperti hukum seorang wanita menikahkan dirinya dan pernikahan orang yang sedang berihram. Maka hal tersebut berdasarkan riwayat ini adalah thalak bukan fasakh.

Kedua, bahwa yang menjadi pertimbangan dalam hal itu ialah sebab yang mengharuskan adanya perceraian. Jika tidak kembali kepada suami istri, yang jika hendak membangun hubungan suami istri bersamanya tidak sah, maka itu dinamakan fasakh, seperti pernikahan wanita yang diharamkan karena susunan atau pernikahan yang masih dalam *iddah*, jika keduanya tidak bisa membangunnya seperti menolak pernikahan karena ada cacat, maka hal itu dinamakan thalak.⁹⁰

⁹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hal. 142.



Ahli fikih golongan Hanafi membuat rumusan umum untuk membedakan pengertian pisahnya suami istri sebab talak dan sebab *fasakh*. Mereka berkata “pisahnya suami istri karena suami, dan sama sekali tidak ada pengaruh istri disebut talak .” Dan setiap perpisahan suami istri karena istri, bukan karena suami, atau karena suami tetap dengan pengaruh dari istri disebut *fasakh*.

Imam Syafi’i mengatakan, perpisahan di antara suami istri memiliki beberapa macam bentuk yang semuanya bisa disebut dengan istilah *al-furqah*. Namun demikian, di dalam istilah *furqah* tersebut terdapat nama-nama yang berbeda-beda.⁹¹ Di antaranya adalah talaq, *fasakh* dan lain-lain.

Perbedaan *fasakh* dengan talaq dapat dibedakan menjadi tiga bentuk diantaranya adalah:

Dipandang dari hakikat keduanya: *fasakh* adalah membatalkan akad secara seketika saat diputuskan dan menghilangkan hubungan yang menjadi konsekuensi dari akad tersebut. Adapun talaq adalah berakhirnya akad pernikahan dengan menggunakan lafaz tertentu.⁹² Namun tidak sampai menghilangkan ikatan hubungan perkawinan tersebut seketika kecuali setelah terjadinya talaq *ba’in* (talaq yang ketiga).

Dipandang dari faktor penyebab keduanya : *fasakh* ada kalanya disebabkan karena hal-hal yang datang kemudian (setelah akad), yang keberadaannya justru bertentangan dengan keberadaan perkawinan itu sendiri. Dan adakalanya disebabkan hal-hal yang munculnya berbarengan dengan akad

⁹¹ Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, (tt, tpn, tth), hal. 105-106.

⁹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa’adilatuh*, (Beirut: Daar Al-Fiqh, 1989), Jilid 8, hal. 348.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

atau tidak terpenuhinya syarat akad, yang keberadaannya menunjukkan tidak lestari akad secara total.⁹³ Hal-hal yang datang setelah akad, contohnya adalah syarat baligh (*khiyarah-bulugh*) dan syarat kufu’.

Dipandang dari implikasi keduanya : *fasakh* tidak mengurangi bilangan talaq yang dimiliki suami. Berbeda dengan talaq, yang dapat mengurangi bilangannya. Selain talaq tidak berkurang dengan *fasakh*, talaq juga tidak dapat terjadi di tengah-tengah masa iddahnya *fasakh*, kecuali *fasakh* yang disebabkan karena murtad atau mengingkari Islam, maka talaq dapat terjadi menurut Hanafiyah dengan pertimbangan, hal itu untuk menghukum pelaku murtad. Adapun di masa iddah talaq, bisa saja terjadi talaq yang lain, dan di malam masa *iddah talaq* itu masih berlaku hukum suami istri. *Fasakh* yang dilakukan sebelum keduanya melakukan hubungan intim, maka istri tidak mendapatkan mahar sama sekali. Adapun talaq yang terjadi sebelum keduanya melakukan hubungan intim, maka istri mendapatkan separuh mahar. Jika tidak ada mahar maka perempuan tersebut berhak mendapatkan *mut’ah* (pemberian yang dimaksudkan untuk menghibur hatinya).

Menurut KHI (Komplikasi Hukum Islam). Adapun problema nikah *fasakh* ditinjau dalam KHI Mengenai pernikahan yang dapat dibatalkan menurut KHI adalah apabila seorang suami yang telah dan masih mempunyai istri melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama. Apabila wanita yang dinikahi ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri laki-laki yang *mafqud*. Yaitu laki-laki yang masih sah menjadi suaminya. Apabila wanita

⁹³ *Ibid.*, hal. 349.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dinikahinya ternyata masih dalam iddah dari suaminya yang terdahulu. Apabila terjadi suatu pernikahan yang melanggar batas umur minimal pernikahan. Sebagaimana ditetapkan pasal 7 UU No.1 th 1974 tentang Perkawinan mengenai dispensasi nikah. Apabila terjadi suatu pernikahan tanpa adanya wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak mempunyai hak untuk menikahkan. Pernikahan seperti ini banyak disebut nikah sirri. Apabila pernikahan itu terjadi dengan adanya paksaan. Hal tersebut tertera dalam KHI pasal 71:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang mafqud
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan pasal 7 UU no. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁹⁴

Masa pelaksanaan fasakh, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Imam Syafi'i berkata, "Harus menunggu selama tiga hari." Sedangkan Imam Malik mengatakan, "Harus menunggu selama satu bulan." Dan Imam Hambali mengatakan "Harus menunggu selama satu tahun." Semua itu

⁹⁴ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI, 2000), hal. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksudnya adalah selama masa tersebut laki-laki boleh mengambil keputusan akan bercerai atau memberikan nafkah bila isteri tidak rela lagi.

Kalau si isteri mau menunggu, dan rela dengan ada belanja dari suaminya, maka tidak perlu difasakhkan sebab nafkah itu adalah haknya. Bunyi lafal fasakhitu umpamanya: “Aku fasakhkan nikahmu dari suamimu yang bernama ... bin ... pada hari ini.” Fasakh itu dilakukan oleh isteri sendiri di muka hakim, maka ia berkata: “Aku fasakhkan nikahku dari suamiku yang bernama ... bin ... pada hari ini.” Setelah fasakh itu dilakukan, maka perceraian itu dinamakan talak ba’in. Kalau suami hendak kembali kepadanya, maka harus dengan nikah lagi dengan akad baru. Sedang iddahnya sebagai iddah talak biasa.⁹⁵

i. Taklik Talak

Arti daripada ta’lik ialah menggantungkan, jadi pengertian ta’lik talak ialah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu.

Di Indonesia pembacaan ta’lik talak dilakukan oleh suami setelah akad nikah. Adapun sighat ta’lik talak yang tercantum dalam buku nikah dari Departemen Agama adalah sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- Meninggalkan isteri saya tersebut enam bulan berturut-turut;
- Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

⁹⁵ Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, (tt, tpn, tth), hal. 105 –106.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
- d. Atau saya membiarkan/tidak memperdulikan isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp sebagai ‘iwald (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang ‘iwald (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

Talak satu yang dijatuhkan suami berdasarkan ta’lik, mengakibatkan hak talak suami tinggal dua kali, apabila keduanya kembali melakukan perkawinan lagi.

Kalau kita perhatikan jatuhnya talak dengan ta’lik ini hampir sama dengan khuluk, sebab sama- sama disertai uang ‘iwald dari pihak isteri. Sehingga talak yang dijatuhkan atas dasar ta’lik dianggap sebagai talak ba’in, suami boleh mengambil isterinya kembali dengan jalan melaksanakan akad-nikah baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap judul tesis ini, maka beberapa *point* yang dapat diambil sebagai kesimpulan dari karya ilmiah (tesis) ini, yaitu;

1. Dari hasil penelitian penulis tesis yang berjudul Penggunaan Hak Fasakh oleh Istri Narapidana 2 tahun di Lapas kelas II B Pasir Pengaraian Secara umum, hasil penelaahan penulis tentang hak fasakh yang dilakukan oleh perempuan yang suaminya dipenjara 2 tahun di lapas Pasir Pengaraian telah sesuai menurut KHI dan Fikih. Alasan mereka bercerai bukan hanya karena suaminya dipenjara dan juga bukan selama suaminya di penjara, tetapi pemicu perceraian sudah terjadi sebelum suaminya dipenjara. Maka itu dibolehkan. selama suaminya berada di penjara juga terjadi perselisihan terus menerus yang tidak mungkin diselesaikan
2. Penggunaan Hak Fasakh Oleh Istri Narapidana 2 tahun di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian tidak bertentangan dengan hukum Islam, fasakh merupakan sesuatu hal yang dibolehkan dalam syari'at Islam, akan tetapi boleh atau tidaknya fasakh perkawinan dengan alasan ketidakmampuan suami memberi nafkah pada istri masih diperdebatkan di kalangan fuqaha'. Karena masing-masing dari mereka memiliki dalil dan argumen sendiri-sendiri, maka sikap yang paling baik adalah memberikan toleransi



kepada semua pendapat yang berbeda setelah terlebih dahulu mengkaji pendapat-pendapat mereka.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, dapatlah penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Semoga tesis ini menjadi ilmu bagi yang membacanya, khususnya bagi bapak-bapak untuk selalu menafkahi keluarga nya karena itu merupakan kewajiban yang harus dipikul dan dipenuhi. Dan janganlah sekali-kali mengabaikan apa yang telah menjadi kewajiban walaupun sedang dalam keadaan sempit, karena dibalik kesempitan pasti ada kelapangan bagi orang-orang yang senantiasa berdoa dan bertaubat,
2. Kepada pemimpin umat agar selalu mendampingi masyarakatnya, memberikan penjelasan, dan perhatian kepada khalayak umat agar tidak menyimpang dari syariat agama dalam hal pernikahan khususnya dan hal lain umumnya, dengan harapan umat Islam agar senantiasa menjaga rumah tangga dan pernikahan dengan mentaati dan menjalankan semua aturan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT agar kita mendapat rahmatnya, Amin.
3. Untuk para istri jika suami sedang dalam kesempitan maka bersabarlah sampai diberinya kelapangan, dan jika kesempitan yang terus berkelanjutan maka para istri boleh memilih bertahan atau minta untuk diceraikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008
- Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung, 2007
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, 1999
- Abu Malik Kamal bin as sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007
- Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tintamas, 1968
- Adi Sujatno & Wan Nazari, *Curah Pikir Dua Sahabat*, Jakarta: Team 7 AS, 2010
- Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana* , Jakarta: Sarwoko, 1986
- Abdul, Narapidana Lapas kelas II B Pasir Pengaraian, *Wawancara*, 15 Oktober 2019
- Adek Roma, Narapidana Lapas kelas II B Pasir Pengaraian, *Wawancara* 15 Oktober 2019
- Ahmad Ghundur, *At-Talaq Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiah, Wa' al-Qonun*, Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1967.
- Ahrun Hoerudin, *Pengadilan Agama Bahasan Tentang Pengertian Pengajar Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, tt
- Ahmad Rofiqoh , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Ani, Istri Narapidana, *Wawancara* 18 September , 2019
- Al-Badran. *Al-Fiqh Al-Muqaran Li Al-Akhwat Asy Syakhsyah*. Juz.1. Beirut: Daar An-Nuhdhah AlArabiyah
- Alhamdani, *Risalah Nikah*, cet III, Jakarta: Pustaka Setia, 2011
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2019
- Beni Ahmad Sabani, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Brosur lapas kelas IIB Pasir Pengaraian

Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, Jakarta: Aksara, 2003

Dokumen Lapas kelas II B Pasir Pengaraian

Dwidja Priyanto, *System Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2013

Dahlan, Al-Barry, Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual. Surabaya.Target Press, 2003

Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Arda Utama, 1992/1993

Dapartemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV. Jumanatul 'Ali, 2005

Dapartemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Bogor, PT Sigma Examedia Arkanleema, 2007

Dapartemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV. Jumanatul 'Ali Art, 2005

Dapartemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung:CV. Jumanatul AliArt, 2005

Depag RI, *Ensiklopedi Islam Indonesia,op.cit*, hal. 285

Dapartemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI, 2000

Dapartemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung:CV. Jumanatul Ali Art, 2005

Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sigma, 2009

Dapartemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI, 2010

Dedi Junaedi,Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Dan As Sunnah), Jakarta: Akademika Pressindo, Cet. III, 2003

Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan ,Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat, Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2005

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditamma, 2006

Hamzah, *KUHP “* (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2004



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan, 1995
- <http://nurisrns1.blocspot.com/2013/12/perceraian-gugatan-isteri-fasakh.html>
- http://referensi_makalah.com/2012/08/pengertian-data-dan-fakta-dalam.html
- <http://pendidikan.blogspot.com/2011/05/pengertian-fasakh.html>.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diakses pada hari Selasa 01 Oktober 2013
- Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulugh Al-maram*, aplikasi, Versi 3.01
- Idris Raulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 65.
- Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatto*, Beirut: Dar Al-Fikir, 1989
- Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1393 H
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014
- Jalal Ad-din, *Assuyuthi, Al-Asybah wa an-nadair fi Al-Furu'*, Dar Al-Fikr, t.th
- Jurnal dari Erepo Unud, 2016 Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana.<http://erepo.unud.ac.id>. Universitas Udayana. Hlm 3. Diakses pada 7 Januari 2018.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, (Jakarta :Bulan Bintang, 1993
- Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan perkawinan muslim perkawinan kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002
- Malik, Muwatha' Malik, 1974, Beirut; Daar al-Fikr, 2010
- Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. 2009
- Mangunhardjana, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, Yogyakarta, Kanasius, 1986
- Malik, *Muwatha' Malik*, Beirut: Daar al-Fikr, 1974
- Muhammad Ibnu Abidin, *Hasiyah Radd <Al-Mukhtar*, (tt, Daar Al-Fikr, tth)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, tt, tpn, tth
- Muhammad Arif Wahyudi, *Fasakh Perkawinan Dengan Alasan Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Istri Dalam Persepektif Imam Abu Hanifah*, Thesis Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Munawwir, *Al-Munawwir*, Surabaya; Pustaka Progressif, 1997
- Nani, Istri Narapidana Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian, *Wawancara* 18 September 2019
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2003
- Nizamuddin, *Fasakh Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istrinya Menurut Pendapat Imam Syafi'i*, Thesis Uin Arraniri Darussalam Banda Aceh, 2016
- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Pusat, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, 1984
- Pegawai Lapaz kelas II B Pasir Pengaraian
- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Pusat, *Op. Cit*, hal. 270.
- Rabiatul Adawiyah, *Hak-Hak Suami yang Berstatus Narapidana Terhadap Gugat Cerai*, Jurnal UIN Antasari, 2015.
- Raihanah Haji Abdullah, "Alasan Membubarkan Perkawinan Melalui Fasakh, "Blog Raihanah Haji Abdullah, <http://eskapisminda.blogspot.com/2019/fasakh.html>. Rabiatul Adawiyah, *Hak-Hak Suami yang Berstatus Narapidana Terhadap Gugat Cerai*, Jurnal UIN Antasari, 2015
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Granit, 2005
- Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, jilid2, Beirut: Dar Al-Fikr, 1992
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1981 hal. 117 lihat juga Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sahrani, Thiani Sobari, *Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1983
- Srik, Istri Narapidana, *Wawancara*, 18 September 2019
- Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT.RINEKA CIPTA, 2009
- Sunan Ibn Majah, *Al-Maktabah Tsamilah* Juz 1, hal. 650.
- Suni, *Cerai Gugat Istri Akibat Suami di Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Thesis, Uin Raden Fatah Palembang, 2016
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang*, Yogyakarta: Liberty, 1982
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Slamet Abidin, dan Aminudin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Syafriadi, Narapidana Lapas kelas II B Pasir Pengaraian, *Wawancara* 18 September, 2019
- Taqiy Ad-Din Abi Bakr, *Kifayah Al-Ahyar*, Juz 1, Indonesia: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arobiyyah, t-th
- Tengku Ismail Yusuf, Narapidana Lapas kelas II B Pasir Pengaraian, *Wawancara* 18 September 2019, .
- Undang-Undang Perkawinan (UU.No.1 Th.1974, PP.No.9 Th.1975, PP.No.10 Th.1983, PP.No.45 Th.1990)*, Cet II, Bandung : Citra Umbara, 2012
- Undang-Undang Perkawinan UU.No.1 Th.1974, PP.No.9 Th.1975, PP.No.10 Th.1983, PP.No.45 Th.1990*. Cet. II. 2012. Bandung: Citra Umbara
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa'adilatuh*, Beirut: Daar Al-Fiqh, 1989
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 9,
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Lajnah Pentashih Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1989



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai 1 & 11 Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jendral Sudirman No. 460 Telp. (0761) 38119 Fax. (0761) 38117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



012010

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/25143
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau Nomor : 1912/UH.04/PPs/PP.00.9/2019 Tanggal 5 Agustus 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	1. SITI FATIMAH LUBIS
2. NIM / KTP	2. 21790225833
3. Program Studi	3. HUKUM KELUARGA
4. Konsentrasi	4. HUKUM KELUARGA
5. Jenjang	5. S2
6. Judul Penelitian	6. PENGGUNAAN HAK CERAI OLEH ISTRI NARAPIDANA 3 TAHUN DI LAPAZ KELAS II B PASIR PENGARAIAN MENURUT HUKUM ISLAM
7. Lokasi Penelitian	7. LAPAZ KELAS II B PASIR PENGARAIAN KABUPATEN ROKAN HULU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 Agustus 2019



Dilandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :
 Disampaikan Kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau di Pekanbaru
 Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU
 Jl. Jenderal Sudirman No. 233 Telp./ Fax. (0761) 23846 – 21860

14 Agustus 2019

Nomor : W4-HM.02.03.4103
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Riset

Yth :

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Klas IIB-Pasir Pengaraian

Memperhatikan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Provinsi Riau, Nomor:503/DPMPSTP/NDN IZIN-RASET/25143 tanggal 08 Agustus 2019 perihal Permohonan Izin Penelitian di Lapas Klas IIB Pasir Pengaraian, bersama ini dengan hormat kami hadapkan mahasiswa Universitas Sultan Syarif Kasim Riau atas nama:

Nama	: Siti Fatimah Lubis
No. Mahasiswa	: 21790225833
Program Studi	: Hukum Keluarga
Perguruan Tinggi	: UIN SUSKA Riau

Untuk melakukan pengumpulan data penelitian / Riset dalam rangka penyusunan Tesis Program Pascasarjana Strata II (S-II) dengan judul : **"Penggunaan Hak Cerai Oleh Istri Narapidana 2 Tahun di Lapas Klas IIB Pasir Pengaraian Menurut Hukum Islam"** dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pada prinsipnya kami menyetujui pelaksanaan kegiatan dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan wewenang Saudara dan disesuaikan dengan tata aturan yang berkenaan dengan keamanan dan ketertiban dalam Lapas/Rutan/Cabang Rutan.
- Pelaksanaan kegiatan berlangsung sampai dengan selesai pengumpulan data yang diperlukan.
- Setelah selesai menjalankan kegiatan tersebut, diminta perhatian Saudara untuk melaporkan hasilnya kepada kami.
- Laporan Kegiatan yang sudah jadi agar dapat di fotocopy dan dijilid serta di berikan kepada kami, untuk bahan kajian hukum dan perpustakaan ilmiah.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. Kantor Wilayah,
Kepala Divisi Pemasyarakatan



Sunang Pasaribu
 Nip.195910121983031002



TEMBELAN:

- KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (SEBAGAI LAPORAN)
- DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU
- MAHASISWA YANG BERLAKSUKAN
- AKSI

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diizinkan mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONDISI SPALAN (ANATOMI) DAN ISYARAH					
NO	Tempat anatomis	Abstrak Pemeriksaan / Parameter	Penyakit yang terjadi	Pemeriksaan	
1.	1. 1/10/10	1. 1/10/10	1. 1/10/10	1. 1/10/10	
2.	2. 1/10/10	2. 1/10/10	2. 1/10/10	2. 1/10/10	
3.	3. 1/10/10	3. 1/10/10	3. 1/10/10	3. 1/10/10	
4.	4. 1/10/10	4. 1/10/10	4. 1/10/10	4. 1/10/10	
5.	5. 1/10/10	5. 1/10/10	5. 1/10/10	5. 1/10/10	
6.	6. 1/10/10	6. 1/10/10	6. 1/10/10	6. 1/10/10	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DATA DIRI

NAMA : **SITI FATIMAH LUBIS**
NIM : 21790225833
TTL : Sei Tapung, 31-01-1994
ALAMAT : Jl. Garuda Sakti, Panam Kota Pekanbaru
NO HP : 082389739110

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 013 Tandun Periode (2000-2006)
2. MTS Musthafawiyah Purba Baru Periode (2006-2009)
3. MA Musthafawiyah Purba Baru Periode (2009-2012)
4. Strata 1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (2013-2017)
5. Kemudian melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jurusan Hukum Keluarga (2018-2020)

KARYA ILMIAH

1. Penetapan Denda Pada Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah di BMT Al-Ittihad Delima Pekanbaru Perspektif Fiqih Muamalah (2017)
2. Penggunaan Hak Fasakh Oleh Istri Narapidana 2 Tahun di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Menurut Hukum Islam
 Semoga hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Amin yaa rabbal 'alamin

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Penulis merupakan buah hati kedua dari pasangan suami istri Ayahanda Munar Ali Lubis dan Ibunda Khodijah Parinduri, lahir tanggal 31 Januari 1994, di Desa Sei Tapung, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu Riau. Penulis memiliki 3 orang saudara.